



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2025 - 2029**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang telah menyelesaikan Rencana Strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang merupakan dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Kami berharap Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dapat memberikan gambaran kondisi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan tugasnya dalam menentukan prioritas-prioritas pembangunan di bidang tenaga kerja, perindustrian dan transmigrasi, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu periode 2025-2029 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan, memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang periode 2025-2029, mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu periode 2025-2029 dan memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 ini.

Semoga Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang ini dapat memberikan manfaat yang optimal.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG	9
2.1. Gambaran Pelayanan DTKPT Kab. Pemalang	9
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis DTKPT Kab. Pemalang..	30
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	38
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra DTKPT Kab. Pemalang Tahun 2025-2029	38
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan	50
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	60
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	60
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Tenaga Kerja...	112
BAB V PENUTUP	114

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	12
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	13
Tabel 2.3.	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat	13
Tabel 2.4.	Aset dan Sarpras DTKPT Kab. Pemalang	13
Tabel 2.5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan DTKPT Kab. Pemalang Tahun 2020-2024	17
Tabel 2.6.	Data Jumlah Peserta Pelatihan dan LPKS Tahun 2020- 2024	19
Tabel 2.7.	Data Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2020-2024	19
Tabel 2.8.	Data Ketenagakerjaan Bidang HI Tahun 2020-2024	20
Tabel 2.9.	Capaian Pembangunan Urusan Perindustrian Tahun 2020-2024	21
Tabel 2.10.	Data Transmigrasi Tahun 2020-2024	22
Tabel 2.11.	Capaian Pembangunan Urusan Tenaga Kerja 5 Tahun Terakhir Tahun 2020-2024	23
Tabel 2.12.	Realisasi Anggaran DTKPT Kab Pemalang Tahun 2020- 2024	24
Tabel 2.13.	Kerjasama Daerah	27
Tabel 2.14.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DTKPT Kab. Pemalang	30
Tabel 2.15.	Isu Strategis Perangkat Daerah	33
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Renstra DTKPT Kab. Pemalang Tahun 2025-2029	42
Tabel 3.2.	Penahapan Renstra DTKPT Kab. Pemalang	53
Tabel 3.3.	Arah Kebijakan Perangkat Daerah	56
Tabel 4.1.	Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra DTKPT Kab. Pemalang	65
Tabel 4.2.	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan DTKPT Kab. Pemalang	78
Tabel 4.3.	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	111
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	112
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Kunci	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagian Alur Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah 2

Gambar 1.2. Struktur Organisasi 12

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan undang undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah baik yang bersifat jangka panjang, menengah maupun pendek. Undang-Pundang ini mengamanatkan setiap daerah harus menyusun perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari RPJP, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja OPD dan RKPD.

Perencanaan Strategi Instansi dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra PD. Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun. Sedangkan sesuai pasal 272 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi, Perindustrian dan Trsnsmigarsi Kabupaten Pemalang merupakan penggabungan dari Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi dan satu urusan perindustrian yang semula berada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Perindustrian, Perdagangan. Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi, Perindustrian dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Transmigrasi di Kabupaten Pemalang.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 disusun berpedoman kepada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Janagka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dalam penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah memuat tujuan, isu Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta sub kegiatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Perumusan RENSTRA PD dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung Pemerintah Daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra disusun berdasarkan Tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Tahapan penyusunan rancangan renstra dapat digambarkan dalam bagian alir sebagai berikut:



Gambar 1.1

Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Renstra memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis, renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja

Berdasarkan hal tersebut di atas, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yang mengacu pada agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029. Selain sebagai bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan di atas, juga didasarkan kepada kebutuhan pembangunan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi, Perindustrian dan Transmigrasi untuk mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Pemalang.

1.2. Dasar Hukum Pemyusunan

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (

- Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
 7. Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengerustamaan Gender di Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang kodifikasi, klasifikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Janagka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2039;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 25).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang, adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah.
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang serta para pihak terkait dalam pembanagunan di bidanag ketenagakerjaan.
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang.
4. Sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang 2025-2029 didasarkan pada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

1.1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 serta disusun sesuai kaidah penyusunan produk hukum.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

1.4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggungjawab Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Menyajikan tugas, fungsi dan struktur Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang

2.1.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

Menyajikan data-data dan informasi sumberdaya DPMPSTSP Kabupaten Pemalang yang meliputi sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menyajikan data-data dan informasi pelayanan yang menjadi urusan dan tanggung jawab Dinas

Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
Kabupaten Pemalang

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Mengidentifikasi masyarakat yang terlibat dalam urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, Perindustrian dan transmigrasi.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan
Mengidentifikasi Perangkat Daerah yang terlibat dalam rangka meningkatkan kemudahan dan kecepatan didalam pemberian pelayanan perizinan kepada masyarakat.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang.

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah

Mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang

2.2.2. Isu Strategis

Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis yang dapat mempengaruhi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang baik secara langsung maupun tidak langsung

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menyajikan tujuan, sasaran dan arah kebijakan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Menentukan tujuan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang berdasarkan NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Menentukan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang berdasarkan NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat

- 3.3. Strategi Perangkat Daerah
Menentukan strategi Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang berisi tindakan yang komprehensif yang akan dilakukan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang
- 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Menyajikan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menyajikan program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan ketenagakerjaan, perindustrian dan transmigrasi

- 4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Menyajikan program, kegiatan dan subkegiatan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output.
- 4.2. Uraian Subkegiatan Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Menyajikan uraian subkegiatan prioritas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi pedoman pembangunan daerah dan dapat diterjemahkan menjadi aksi-aksi nyata yang dapat diimplementasikan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, Kabupaten Pemalang.
- 4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Menyajikan indikator kinerja utama atau IKU Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta menjadikan IKU tersebut sebagai prioritas utama
- 4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Menyajikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang

BAB V PENUTUP

Menyajikan kesimpulan penting substantif, kaidah pelaksanaan serta pelaksanaan pengendalian evaluasi

- 5.1. Kesimpulan Penting Subtansial
Menyajikan kesimpulan penting substansial Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029
- 5.2. Kaidah Pelaksanaan
Menyajikan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029
- 5.3. Pelaksanaan Pengendalian Evaluasi
Menyajikan Pelaksanaan pengendalian evaluasi Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memastikan pencapaian target program dan kegiatan, menilai kinerja serta mengendalikan risiko strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi, Perindustrian dan Transmigrasi

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, menyebutkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

B. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi serta pembinaan hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi serta pembinaan hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi serta pembinaan hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan social tenaga kerja;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, maka struktur Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang terdiri dari:

a. Kepala Dinas

Tugas:

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi, bidang pembinaan hubungan industrial, serta bidang perindustrian;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi, bidang pembinaan hubungan industrial, serta bidang perindustrian;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi, bidang pembinaan hubungan industrial, serta bidang perindustrian;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Tugas:

melaksanakan mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi.

Fungsi:

1. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
2. penyiapan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
3. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
4. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
5. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
6. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
7. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan, Produktivitas dan Transmigrasi

Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi.

Fungsi:

1. menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi; dan
2. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Tugas:

melaksanakan menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

Fungsi:

1. menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja; dan
2. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Perindustrian

Tugas:

melaksanakan menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian.

Fungsi:

1. menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian; dan
2. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

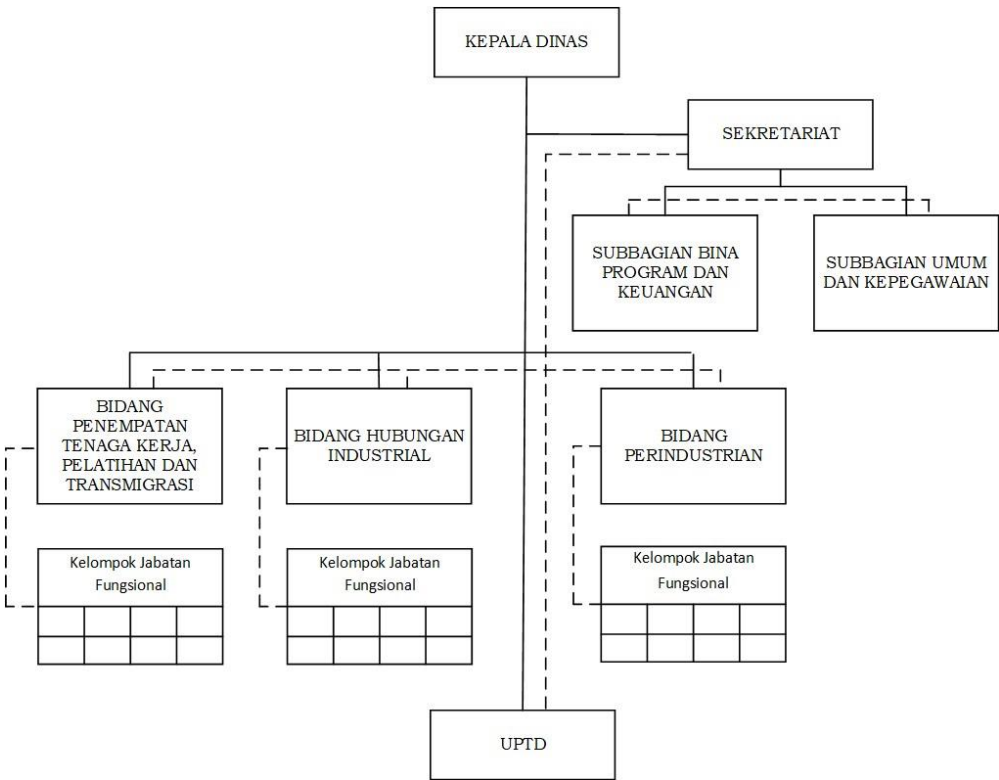
f. UPTD BLK

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi dalam menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja.

BLK mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja yang berbasis kewirausahaan;
2. Pemasaran program pelatihan tenaga kerja;
3. Penyelenggaraan uji kompetensi dan bursa kerja khusus.

C. Struktur Organisasi



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi, Transmigrasi Kab. Pemalang

2.1.2.Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang pada tahun 2025 sebanyak 50 orang dengan perincian sebagai berikut :

A. Sumber Daya Manusia Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Berdasarkan Tingkat Golongan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Golongan I	2	-	2
2	Golongan II	9	1	10
3	Golongan III	18	16	34
4	Golongan IV	4	-	4
	Jumlah	33	17	50

Sumber Data : DTKP Kabupaten Pemalang tahun 2026

2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4	5
1.	Pascasarjana (S2)	2	2	0
2.	Sarjana (S1)	33	19	14
3.	Sarjana Muda (D3/D4)	6	4	2
4.	SMA	7	6	1
5.	SMP	1	1	0
6.	SD	1	1	0
Jumlah		50	33	17

Sumber Data : DTKPT Kabupaten Pemalang tahun 2026

3. Jumlah Pegawai Yang mengikuti Diklat dan Pelatihan-pelatihan/bintek

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Berdasarkan Diklat Struktural

NO.	Jenis Diklat/Bimtek/Sosialisasi	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4	5
1.	Diklatpim Tk. II	1	1	-
2.	Diklatpim Tk. III	2	2	-
3.	Diklatpim Tk. IV	5	3	2
4.	Diklat Dasar Instruktur	4	2	2

Sumber Data : DTKP Kabupaten Pemalang tahun 2025

Adapun keadaan aset dan perlengkapan untuk mendukung kegiatan, secara garis besar antara lain :

B. Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi

DAFTAR ASET
DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2025

Tabel 2.4
Aset dan Sarana Prasarana Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Per 31 Desember 2025

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI	
			RUSAK	BAIK
1	2	3	4	5
1	ALAT BESAR			
	- alat pengangkat lainnya (dst)	2		2
	- Portable Generating Set	1		1
	- pompa lainnya (dst)	8		8
2	KOMPUTER			
	-Komputer Jaringan lainnya	1		1
	-P.C Unit	58		58
	-Lap Top	44		44
	-CPU (Peralatan Mainframe)	1		1

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI	
			RUSAK	BAIK
	-Hard Disk	6		6
	-Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2	2	
	-Speaker Komputer	1		1
	-CPU (Peralatan Personal Komputer)	2		2
	-Monitor	2	2	
	-Printer (Peralatan Personal Komputer)	59	9	50
	-Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2		2
	-Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	1		1
	-Peralatan Personal Komputer lainnya	1		1
	-Server		2	2
	-Router		1	1
	-Hub		1	1
	-Peralatan Jaringan lainnya		1	1
3	ALAT ANGKUTAN			
	- Station Wagon		7	7
	•Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)		1	1
	•Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)		1	1
	•Pick Up		1	1
	- Sepeda Motor	2	18	20
	- kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya (dst)		3	3
4	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR			
	- Mesin Bor	1		1
	- Mesin Gerinda	1	2	3
	- Mesin Jahit Kulit	10	2	12
	- Mesin Kompresor	2	2	4
	- Mesin Las Listrik		3	3
	- Mesin Pelubang (Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi)		1	1
	- Mesin Gerinda Tangan	1		1
	- Battery Charge	1		1
	- perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	13		13
	- perkakas bengkel service lainnya (dst)	5	15	20
	- perkakas pengangkat bermesin lainnya (dst)		1	1
	- Mesin Bor Kayu		1	1
	- Peralatan Las Listrik	7	6	13
	- peralatan las lainnya (dst)		22	22
	- Tabung NH3	1		1
	- perkakas bengkel konstruksi logam lainnya (dst)	17	10	27
	- perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	2		2
	- perkakas bengkel service lainnya (dst)	11	12	23
	- Tool Kit Box		8	8
	- Engine Stand	11	5	16
	- perkakas standard (standard tools) lainnya (dst)		6	6
	- Digital Tang Ampere		8	8
	- perkakas bengkel kerja lainnya (dst)	6		6
	- Kunci Pas		8	8
	- Drei Biasa (Obeng)		8	8
	- peralatan tukang besi lainnya (dst)	1		1
	- alat bengkel tak bermesin lainnya lainnya (dst)		16	16
	- Multi Meter		16	16
	- alat ukur universal lainnya (dst)	1	1	2
	- Scanner (Universal Tester)		1	1
	- Termometer Standar		1	1
	- Tool Set		1	1
5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI	
			RUSAK	BAIK
	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	6		6
	- Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	3		3
	- Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	1		1
	- Mesin Fotocopy Double Folio		1	1
	- Lemari Besi/Metal		8	8
	- Lemari Kayu		30	30
	- Rak Besi		8	8
	- Rak Kayu	2	4	6
	- Filing Cabinet Besi		15	15
	- Lemari Kaca		3	3
	- CCTV Camera Control Television System		1	1
	- Papan Visual/Papan Nama		1	1
	- White Board		2	2
	- Alat Penghancur Kertas		3	3
	- Mesin Absensi	1	3	4
	- Overhead Projector	1	3	4
	- Papan Nama Instansi		5	5
	- Papan Pengumuman		5	5
	- Papan Tulis		3	3
	- Alat Kantor Lainnya	15	14	29
	- Meja Kerja Besi/Metal	1	1	2
	- Meja Kerja Kayu		23	23
	- Kursi Besi/Metal		9	9
	- Kursi Kayu	33	24	57
	- Meja Rapat		5	5
	- Tempat Tidur Besi	20		20
	- Meja Sekolah		50	50
	- Meja 1/2 Biro	1		1
	- Kursi Putar	6	4	10
	- Bangku Tunggu	1	1	2
	- Kursi Lipat		210	210
	- Meja Komputer		17	17
	- Sofa	4		4
	- Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner		2	2
	- Mesin Pemotong Rumput	1	1	2
	- Lemari Es		3	3
	- A.C. Window	10	17	27
	- A.C. Split		19	19
	- Kompor Gas (Alat Dapur)		2	2
	- Oven Listrik		5	5
	- Tabung Gas	5		5
	- Kompor Kompresor	3		3
	- Rak Piring Alumunium		1	1
	- Mixer		2	2
	- Oven Gas		2	2
	- Alat Dapur lainnya	11	7	18
	- Televisi	5	2	7
	- Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1		1
	- Amplifier		1	1
	- Loudspeaker		1	1
	- Sound System		7	7
	- Wireless		8	8
	- Unit Power Supply		8	8
	- Camera Video		4	4
	- Mesin Jahit	74	24	98
	- Timbangan Barang		1	1
	- Tiang Bendera		1	1
	- Seterika	1		1
	- Tangga Aluminium		4	4
	- Dispenser	1	6	7
	- Mimbar/Podium		2	2

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI	
			RUSAK	BAIK
	- Coffee Maker		1	1
	- Juiser		1	1
	- Handy Cam		2	2
	- Lemari Plastik		1	1
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	10		10
	- Alat Pemadam/Portable		16	16
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II		1	1
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III		4	4
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural		7	7
	- Meja Kerja Pejabat lain-lain		4	4
	- Meja Tamu Biasa		1	1
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1		1
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	1	5
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	6	14
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural		4	4
	- Kursi Kerja Pejabat lainnya		5	5
	- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II		1	1
	- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	4		4
	- Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota		1	1
	- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis		5	5
6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR			
	- Camera Electronic	1		1
	- Camera Film		1	1
	- Layar Film/Projector		4	4
	- Camera Digital		1	1
	- Alat Studio Video Lainnya		1	1
	- Rambu/Bak Ukur		1	1
	- Pesawat Telephone	2		2
	- Telephone Mobile		4	4
	- Genset		1	1
7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN			
	- Alat Kedokteran umum lainnya	3		3
	- alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)		1	1
8	ALAT LABORATORIUM			
	- Dial & Test Indikator		1	1
	- Blender		3	3
	- Vacuum Pump		8	8
	- Meja Kerja Stainless		2	2
	- Hand Roll Machine	1		1
	- Mesin Overdeck	1		1
	- Mesin Strika Uap	2		2
	- Mesin Bordir Highspeed	1		1
	- Mesin Jahit Pasang Kancing	1		2
	- alat peraga kejuruan lainnya (dst)		4	4

Sumber Data : Disnaker Kabupaten Pemalang tahun 2025

2.1.3.Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang

Gambaran umum terhadap pelayanan yang akan dijabarkan adalah gambaran umum terhadap pelayanan pada Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian selama kurun waktu 5 tahunan (tahun 2021-2024), sebagai berikut :

A. Bidang Ketenagakerjaan

Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Pemalang masih dihadapkan pada berbagai permasalahan mendasar yang memerlukan perhatian dan keterpaduan dalam penanganan.

Masalah pokok ketenagakerjaan adalah adanya kesenjangan antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga menyebabkan pengangguran. Perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Pemalang selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi
Kabupaten Pemalang Periode Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,64	6,71	6,63	6,55	6,63
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	65,57	67,9	69,91	69,58	72,24
3.	Jumlah angkatan kerja	638.570	645.103	687.625	817.491	859.852
4.	Jumlah pengangguran	48.784	43.288	45.587	53.586	57.020
5.	Jumlah pencari kerja	15.307	13.077	12.171	11.903	12.381
6.	Jumlah Bursa Kerja Khusus	60	60	62	61	63
7.	Permasalahan/kasus PMI		14	26	29	23

Pada tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami kenaikan sebesar 7,64% disebabkan karena ada wabah covid 19 Dengan adanya pandemi covid 19 banyak perusahaan melakukan PHK terhadap karyawannya; Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 6,71%, Angka TPT tahun 2021 sudah lebih baik dari angka TPT tahun yang lalu, jumlah pengangguran berkurang dikarenakan perusahaan-perusahaan mulai beroperasi kembali setelah adanya pandemi covid 19 setelah sebelumnya pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan sosial masyarakat sehingga aktivitas masyarakat sangat terbatas. Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,08% menjadi sebesar 6,63% banyak perusahaan memperluas usahanya dan membuka lapangan kerja baru sedangkan untuk tahun 2023 menurun 0,08% menjadi sebesar 6,55% masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, mendorong penciptaan lapangan kerja baru tetapi pada tahun 2024 mengalami kenaikan 0,08% menjadi 6,63%. pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan lapangan pekerjaan, yang mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan ketersediaan pekerjaan

Tahun 2020 Indikator prosentase tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pemalang sebesar 7,64 % merupakan hasil dari jumlah penganggur sebesar 48.784 dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja sebesar 638.570. Pada tahun 2021 TPT sebesar 6,71% yang merupakan hasil dari jumlah penganggur sebesar 43.288 orang dibandingkn dengan jumlah Angkatan kerja sebesar 645.103 orang, sedangkan untuk tahun 2022 prosentase tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pemalang sebesar 6,63% yang merupakan hasil dari jumlah penganggur 45,587 orang dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja sebesar

687.625 orang, untuk tahun 2023 prosentase tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,55% yang merupakan hasil dari jumlah penganggur bertambah sebesar 53.586 orang dan jumlah angkatan kerja sebesar 817.491 orang. Jumlah penganggur berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja karena Penduduk Usia kerja juga bertambah. Dengan naiknya investasi di Kabupaten Pemalang sangat berpengaruh pada banyaknya lapangan kerja baru. Banyak lapangan usaha usaha dan pekerjaan baru bermunculan yang membuat angka TPT turun.

Sedangkan Tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami kenaikan kembali sebesar 0,08% menjadi 6,63%.

Capaian angka ini tidak hanya didukung oleh Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang juga perlu didukung oleh OPD lain dan stakeholder dalam penurunan angka pengangguran.

Beberapa upaya yang harus dilakukan adalah :

1. Mendorong pertumbuhan investasi melalui program padat karya;
2. Peningkatan kualitas dan produktifitas SDM tenaga kerja melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di dunia industri dan dunia usaha;
3. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM serta penciptaan wirausaha baru;
4. Menyelenggarakan bursa tenaga kerja / job fair dan pencarian informasi lowongan kerja / job canvassing;
5. Mendorong penyiapan tenaga kerja siap pakai melalui program pemagangan;
6. Menyebarkan informasi dan peluang kerja di luar negeri;
7. Mengadakan sosialisasi, pembinaan dan monitoring tentang peraturan ketenagakerjaan dan standar Upah.

Jumlah angkatan kerja Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun mulai tahun 2021 ke tahun 2022 bertambah sebesar 6,59%, tahun 2022 ke 2023 bertambah sebesar 18,9%, tahun 2023 ke 2024 bertambah 5,18%.

Sedangkan untuk jumlah pencari kerja selama kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif.

Upaya perluasan kesempatan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran terus dilakukan antara lain melalui penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri, penyelenggaraan bursa tenaga kerja dan pengembangan informasi tenaga kerja. Sedangkan upaya peningkatan dan produktifitas tenaga kerja dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan kerja dan pemagangan.

Di Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang ada 2 jenis pelatihan yaitu :

- 1. Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah jens pelatihan yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja yang bertujuan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk melakukan tugas kerja tertentu secara efektif, bukan hanya pada teori atau waktu belajar. Ditujukan kepada pencari kerja.
- 2. Pelatihan Berbasis Masyarakat/kewirausahaan bertujuan untuk menciptakan wirausaha baru

Tabel 2.6.
Data Jumlah Peserta Pelatihan dan LPKS
Periode Tahun 2020-2024

No.	Jenis Pelatihan	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Berbasis Kompetensi	160	128	208	320	576
2.	Berbasis Masyarakat	140	280	100	212	180
3.	Jumlah LPKS	39	43	50	44	41

Tabel 2.7.
Data Penempatan Tenaga Kerja
Periode Tahun 2020-2024

No.	Jenis Data	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	AKAD					
	Laki-laki	1.375	1.018	1.939	1.934	129
	Perempuan	1.520	2.200	3.120	2.082	110
Jumlah		2.895	3.218	5.059	4.016	239
2.	AKL					
	Laki-laki	388	1.138	1.104	732	2272
	Perempuan	1.352	4.325	3.543	1.939	5962
Jumlah		1.740	5.463	4.647	2.671	8234
3.	AKAN					
	Laki-laki	25	80	611	118	254
	Perempuan	15	0	390	82	156
Jumlah		40	80	1.001	200	410

B. Bidang Hubungan Industrial Syarat Kerja

Dalam rangka meningkatkan kondisi hubungan industrial yang harmonis melalui peningkatan syarat kerja, perlu meningkatkan sarana prasarana hubungan industrial (Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, Lembaga Kerjasama Bipartit, Tripartit, Dewan Pengupahan, meningkatkan perlindungan upah (UMK). Sedangkan untuk pelayanan hubungan industrial di Kabupaten Pemalang untuk kurun waktu tahun 2020-2024 dapat kami sajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.8.
Data Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Industrial
Periode Tahun 2020-2024

No	Jenis Data	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Perusahaan yang melakukan PHK	5	2	2	2	7
2.	Jumlah TK PHK	85	6	33	300	689
3.	Kasus perselisihan tenaga kerja	6	3	3	5	9
4.	Kasus kecelakaan tenaga kerja	-	-	-	-	-
5.	Kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan	-		61,52 %	55,02 %	64,58
6.	Jumlah perusahaan		420	433	454	457
7.	Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih yang telah memiliki peraturan perusahaan		73	79	83	
8.	Jumlah Perusahaan yang membuat Perjanjian Kerja Bersama	10	11	8	6	6
9.	Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan 50 orang atau lebih yang telah membentuk lembaga kerja sama bipartit	15	19	23	27	22
10.	Jumlah Perusahaan yang telah Memiliki Struktur dan Skala Upah	39	39	41	42	45
11	Upah Minimum Kabupaten (UMK)	1.865.000	1.926.000	1.940.890	2.081.783	2.156.000

Perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam kurun waktu tahun 2020-2024 bersifat fluktuatif, tahun 2020 perusahaan yang melakukan PHK sebanyak 5 perusahaan disebabkan karena adanya wabah covid banyak perusahaan melakukan PHK terhadap karyawannya, tahun 2020-2023 menurun hanya 2 perusahaan setelah adanya wabah covid perekonomian mulai tumbuh kembali dan perusahaan mulai beroperasi kembali . tahun 2024 mengalami kenaikan kembali karena ada beberapa perusahaan mengalami permasalahan internal.Sedangkan jumlah tenaga kerja yang terkena PHK pada tahun 2020 sebanyak 85 orang karena adanya wabah covid, tahun 2021 sebanyak 6 orang, tahun 2022 sebanyak 33 orang, tahun 2023 sebanyak 300 orang dikarenakan ada 2 perusahaan yang melakukan penutupan perusahaan dan tahun 2024 sebanyak 689 orang dikarenakan ada satu perusahaan yang mengalami pailit. Untuk kasus perselisihan tenaga kerja pada tahun 2020 sebanyak 6 kasus, untuk tahun 2021 sebanyak 3 kasus, untuk tahun 2022 sebanyak 3 kasus, untuk tahun 2023 sebanyak 5 kasus dan tahun 2024 sebanyak 9 Kasus dikarenakan banyak perselisihan hak.

Sedangkan untuk Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami kenaikan, untuk tahun 2020 sebesar Rp. 1.865.000,-, tahun 2021 sebesar Rp. 1.926.000,- tahun 2022 sebesar 1.940.890,41,- tahun 2023 sebesar Rp. 2.081.783, tahun 2024 sebesar Rp. 2.156.000,-.Tahun 2025 Rp. 2.296.140,-

C. Bidang Perindustrian

Urusan Perindustrian memiliki fokus kinerja untuk meningkatkan dan mengembangkan industri dengan skala kecil dan menengah. Pada industri kecil menengah (IKM) mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,175% kemudian tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,3%, namun di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,5%. Hal tersebut disebabkan karena banyak industri kecil yang gulung tikar akibat kekurangan modal untuk produksi. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan kembali IKM tersebut adalah dengan memberikan fasilitasi akses permodalan, peningkatan kapasitas SDM IKM dan fasilitasi pemasaran produk IKM. Hasilnya pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 6,43%.

Perlu upaya lanjutan dari Bidang Perindustrian agar semua sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai di tahun-tahun berikutnya. Pengajuan ijin usaha industri dilayani secara online melalui OSS (Online Single Submission) dari Kementerian Investasi/BKPM, Fasilitasi SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) dan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), Rekomendasi Pengurangan Tarif Dasar Listrik Industri, Layanan Konsultasi Online dan Otomatis (LOTIS) untuk Industri Kecil dan Menengah.

Pada Tahun 2023 dilaksanakan pemantauan dan analisis ijin usaha industri kecil dan menengah terhadap 60 pengajuan permohonan dan dikeluarkan rekomendasi sebanyak 60 sehingga capaiannya sebesar 100%. Secara rinci perkembangan kinerja urusan perindustrian di Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut.

Tabel 2.9
Capaian Pembangunan Urusan Perindustrian Kabupaten Pemalang
Periode Tahun 2020-2024

NO	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase pertumbuhan IKM	%	0,25	4,2	5,5	5	6,43
2.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	21,94	21,95	20,58	22,38	22,51
3.	Persentase Industri yang mendapat fasilitas Izin Usaha Industri	%	100	100	100	100	100
4.	Persentase kelengkapan data industri yang masuk dalam SIINAS	%	23,8	17,5	72	100	100
5.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	0	20	20	95,32	46,7
6.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha Industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	57,53	32,73	100	100

D. Bidang Transmigrasi

Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat

sekitarnya serta peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah.

Tabel 2.11
Data Transmigrasi Periode Tahun 2020-2024

NO	Jenis Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah calon transmigran (KK)	0	0	0	0	1
2.	Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK)	0	0	0	0	3

Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya serta peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah. Dari tahun 2020-2023 untuk pemberangkatan transmigrasi dari Kabupaten Pemalang tidak ada karena pemberangkatan transmigrasi tergantung kuota dari pusat. Upaya Disnaker adalah dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penetapan kuota transmigrasi. Tahun 2024 Disnaker Kabupaten pemberangkatkan 1 KK ke Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang perlu menjalin kerjasama dengan perusahaan dan stakeholders bidang ketenagakerjaan : Kementrian Tenaga Kerja, Disnakertrans Propinsi, Lembaga – Lembaga pelatihan kerja, BKK, IMCA, P3MI, APINDO, SPSI.

Sedangkan untuk capaian/realisasi indikator kinerja daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang tahun 2016-2021 dapat kami sajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.11.
Capaian Pembangunan Urusan Tenaga Kerja 5 Tahun Terakhir Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun					Pertumbuhan Kinerja				Rata-Rata
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,64	6,71	6,63	6,55	6,63	-0,93	0,08	0,08	-0,08	-0,31
2	TPAK	%	65,57	65,9	69,91	69,58	72,24	0,33	4,01	-0,33	2,66	1,67
3	TPAK Laki-laki	%	81,25	80,14	84,56	86,5	85,15	-1,11	4,42	1,94	-1,35	0,98
4	TPAK Perempuan	%	50,48	52,14	55,78	52,33	59,09	1,66	3,64	-3,45	6,76	2,15
5	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah/ Orang	0	31,43	30,98	27,1	76,47	31,43	-0,45	-3,88	49,37	19,12
6	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	0	53,55	63,09	55,02	64,58	53,55	9,54	-8,07	9,56	16,15
7	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten Pemalang	%	0	66,96	87,26	62,76	71,74	66,96	20,3	-24,5	8,98	17,94
8	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	0	47,05	47,47	86,07	100	47,05	0,42	38,6	13,93	25,00
9	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%		63,02	3,55	4,27	5,49	63,02	-59,47	0,72	1,22	1,37
10	Prosentase calon tenaga kerja yang di latih	%	0	0	81,63	83,54	83,12	0	81,63	1,91	-0,42	20,78
11	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kab/Kota	%	0	66,96	87,26	62,76	71,74	66,96	20,3	-24,5	8,98	17,94
12	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	21,94	21,96	21,99	22,38	22,51	20,96	20,99	21,38	21,51	19,99

Sumber : DTKPT Kabupaten Pemalang, 2025

Pencapaian target kinerja tidak lepas dari faktor pendanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 2021-2026. Adapun pendanaan program kegiatan beserta realisasinya secara rinci tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.12.
Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)				Persentase Realisasi Anggaran (%)			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	2.330.000	-	47.392.400	-	170.000	170.000	2.319.270	-	47.305.600	-	99,54	-	99,82	-
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	870.400.000	901.282.500	1.514.730.000	3.942.020.000	1.499.010.510	1.499.010.510	846.778.935	884.848.512	1.511.516.100	3.882.878.646	97,29	98,18	99,79	98,50
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	893.491.000	1.105.975.000	858.000.000	1.010.100.000	1.000.131.930	1.000.131.930	884.502.263	1.103.499.009	856.849.300	985.002.920	98,99	99,78	99,87	97,52
4	Program Hubungan Industrial	280.000.000	200.000.000	175.000.000	546.518.000	2.961.595.700	2.961.595.700	273.578.199	199.211.016	168.977.870	532.346.993	97,71	99,61	96,56	97,41
5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	15.000.000	116.039.000	8.000.000	176.600.000	12.378.300	12.378.300	12.193.917	104.855.924	7.917.000	123.934.721	81,29	90,36	98,96	70,18
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.501.068.000	6.386.472.000	6.400.541.150	5.809.836.350	5.743.198.990	5.743.198.990	5.339.880.742	6.285.625.584	6.145.690.925	5.093.228.487	97,07	98,42	96,02	87,67
7	Program Perencanaan Pembangunan Industri	756.213.700	1.004.978.150	1.088.451.949	1.314.396.163	1.314.396.163	1.445.835.780	687.467.000	913.616.500	989.501.772	1.194.905.603	92	98	100	96
8	Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/Kota	84.896.471	54.890.000	74.212.662	123.209.560	123.209.560	135.530.516	77.178.610	49.900.000	67.466.056	112.008.691	88	99	100	86
9	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	97.341.200	40.700.000	72.839.903	122.647.234	122.647.234	134.911.957	88.492.000	37.000.000	66.218.094	111.497.485	95	91	98	89

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan melihat kondisi kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang sebagaimana uraian diatas, maka tantangan, peluang dan pengembangan pelayanan yang harus kita hadapi antara lain:

a. Tantangan

1. Masih tingginya jumlah pengangguran di Kabupaten Pemalang sehingga diperlukan upaya untuk menurunkan jumlah pengangguran dengan meningkatkan perluasan kesempatan kerja.
2. Tingginya jumlah pencari kerja dan tenaga kerja yang belum memperoleh pelatihan kerja;
3. Terbatasnya sarana prasarana pendukung BLK.
4. Masih rendahnya tingkat kepatuhan Perusahaan industry dalam melaporkan data industry melalui SIINas.
5. Masih tingginya ketergantungan pelaku industry kecil dan menengah terhadap fasilitasi pemerintah daerah dan pihak lainnya.
6. Masih rendahnya kesadaran pelaku industry kecil dan menengah terhadap HAKI.
7. Regenerasi pelaku industri kecil dan menengah belum optimal.

b. Peluang

1. Semakin majunya teknologi informasi melalui internet sehingga menjadikan upaya masyarakat untuk memperoleh kesempatan kerja baik formal maupun informal semakin terbuka dengan atau tanpa memanfaatkan fasilitas BKO (Bursa Kerja Online) yang ada sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja;
2. Aplikasi Data Ketenagakerjaan semakin berkembang sehingga pencari kerja dan pemberi kerja bisa bertemu secara online tanpa melalui tatap muka / Sistem Informasi Data Terpadu Ketenagakerjaan
3. Tumbuhnya perusahaan-perusahaan baru membuka peluang bertambahnya jumlah tenaga kerja;
4. Terjalannya Kerjasama dengan stakeholders dalam bidang ketenagakerjaan;
5. Dengan adanya peningkatan kapasitas bagi Calon Pekerja Migran Indonesia membuka peluang kesempatan bekerja ke luar negeri ;
6. Revitalisasi Balai Latihan Kerja sebagai tempat uji kompetensi (TUK) guna peningkatan kualitas dan pengakuan tenaga kerja.
7. Memaksimalkan instruktur dan tenaga kepelatihan/tenaga pelaksana untuk menyelesaikan administrasi pelatihan dan administrasi perkantoran;

8. Memperluas pelayanan Antar Kerja 1 (AK1) secara online di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Pemalang sehingga dapat mempercepat pelayanan
9. Pertumbuhan industri kecil dan menengah memiliki transformatif
10. Banyaknya potensi hasil pertanian dan perikanan di kabupaten pemalang yang dapat diolah menjadi produk unggulan oleh industri kecil dan menengah.

2.1.4. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang adalah :

1. Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam maupun luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja. Untuk pencari kerja biasanya untuk melamar pekerjaan dibutuhkan kartu Pencari kerja (AK1) selain itu untuk pelatihan yang ada di Balai Latihan kerja juga diperuntukan untuk pencari kerja;
2. Perusahaan
3. Salah satu tugas pokok dan fungsi adalah melakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Pemalang baik perusahaan besar, menengah dan kecil.
4. Tenaga Kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang mampu dan bersedia melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat;
5. Dinas Tenaga kerja, Perindustrian adalah dinas yang menangani urusan tenaga kerja, perindustrian dan transmigrasi.
6. Pelaku industri kecil dan menengah (IKM) dengan memberikan pelatihan, pendampingan, dan akses pembiayaan untuk meningkatkan daya saing usaha;
7. Industri Rumah Tangga, dengan membantu pengembangan produk lokal dan peningkatan kualitas produksi;
8. Masyarakat Umum, dengan melakukan edukasi terkait perlindungan konsumen dan peningkatan akses terhadap produk lokal.

2.1.5. Mitra Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang bermitra dengan pihak-pihak yang dapat berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan dan peningkatan kinerja. Mitra tersebut adalah :

1. APINDO
2. SP/SB;
3. BPJS Ketenagakerjaan;
4. Manning Agent;
5. SPMI;
6. FORUM KOMUNIKASI BKK;

- 7. BBPOM;
- 8. PT. Sucofindo;
- 9. Laboratorium Uji Tar dan Nikotin Kudus;
- 10. Asosiasi Petani Kopi Indonesia;
- 11. Asosiasi Petani Tembakau;
- 12. Perangkat Daerah

2.1.6. Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah dilakukan dalam rangka melegalkan suatu perjanjian yang saling menguntungkan serta menuangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan. Kerjasama yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang adalah :

Tabel 2.13.
Kerjasama Daerah

N o	PERGURUAN TINGGI / INSTANSI	JANGK A WAKT U	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT
1	2	3	4	5	6
	•Pemerintah Kabupaten Pekalongan; •Pemerintah Kabupaten Purbalingga; •Pemerintah Kabupaten Tegal; •Pemerintah Kabupaten Banyumas.		Ketenagakerjaan	a. Memberdayakan Dan Mendayagunakan Tenaga Kerja Secara Optimal Dan Manusiawi. b. Mewujudkan Pemerataan Kesempatan Kerja Dan Penyediaan Tenaga Kerja Sesuai Dengan Kebutuhan Pembangunan Nasional Dan Daerah. c. Memberikan Perlindungan Kepada Tenaga Kerja Dalam Mewujudkan Kesejahteraan	a. Pelatihan Tenaga Kerja; b. Penempatan Tenaga Kerja; c. Pembinaan Hubungan Industrial.
	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI) Semarang		Pelaksanaan Program <i>Three In One</i> (Kuliah, Pelatihan, Dan Bekerja) Bagi Masyarakat Kabupaten Pemalang	a.Mengikuti Pelatihan Kerja di LPK mitra STIEPARI Semarang; b.Bekerja di Perusahaan Mitra STIEPARI Semarang; dan c.Kuliah di STIEPARI Semarang.	a.Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat Kabupaten Pemalang; b.Perkuliahan di STIEPARI Semarang; c.Pelatihan Pada LPK Mitra STIEPARI Semarang; dan Penempatan Tenaga Kerja Pada Perusahaan Mitra

N o	PERGURUAN TINGGI / INSTANSI	JANGK A WAKT U	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT
1	2	3	4	5	6
					STIEPARI Semarang
	Pemerintah Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah		Transmigrasi	Mengintegrasikan dan mensinergikan pelaksanaan transmigrasi di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah	a. penyiapan kesediaan masyarakat menerima penempatan transmigran ; b. penyusunan rencana teknis; c. legalisasi status tanah; d. pelayanan pertanahan; e. monitoring pembangun an permukima n; f. pelatihan transmigran ; g. fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran ; h. bimbingan adaptasi lingkungan; i. fasilitasi pelayanan bantuan catu pangan; j. pengembang an masyarakat yang menyangkut : 1. tahap penyesuai an, 2. tahap pemantapa n, dan 3. tahap kemandiri an. k. kemitraan.
	1.PT. Ghony Jaya Abadi (Teknik Las) 2.PT. Anugrah Mega Jaya (Teknik Las)	19 Juni 2024 s/d 19 Juni 2026	MoU Balai Latihan Kerja Disnaker Kabupaten Pemalang dengan	Meningkatkan kualitas SDM yang terampil, kompeten, dan siap kerja sesuai	Hasil kerja sama yang disepakati dalam dokumen tersebut,

N o	PERGURUAN TINGGI / INSTANSI	JANGK A WAKT U	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT
1	2	3	4	5	6
	3.PT. Tunggal Mitra Perkasa (Otomotif) 4.PT. Prima Anaga Raina (Otomotif) 5.Comal Abadi Motor (Otomotif) 6.Astra Motor Pemalang 1 (Otomotif) 7.Astra Motor Pemalang 2 (Otomotif) 8.AHASS Motor Pemalang (Otomotif)		beberapa perusahaan diantaranya :	kebutuhan industri, melalui pelatihan, magang, serta penyerapan tenaga kerja. Perusahaan mendapatkan tenaga kerja potensi,al, sementara BLK dapat menyalurkan peserta dan mengembangka n program yang berkelanjutan dan tepat sasaran.	seperti program pelatihan, sertifikasi tenaga kerja, penyaluran kerja, dan program magang yang mendukung tujuan bersama, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja perusahaan. Secara keseluruhan, output dari Mou ini adalah hasil nyata dari kolaborasi tersebut, baik itu berupa peningkatan kapasitas SDM, pemenuhan kebutuhan rekrutmen, maupun dampak positif lainnya bagi perkembangan industri dan peningkatan kualitas tenaga kerja.
	9.PT. Mega Putra Garment (Menjahit) 10.PT Daiwabo Garment Indonesia (Menjahit) 11.PT. Dwi Bintang Global (Menjahit) 12.PT. Kali Comal Megah Mandiri (Menjahit) 13.PT. Multikarya Garmentexin do (Menjahit) 14.PT. Noor Amara Garmino (Menjahit) PT. Ria Indah Terang Abadi (Menjahit)	17 Februa ri 2022 s/d 17 Februa ri 2024			

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan evaluasi dan analisis terhadap capaian hasil-hasil pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi masih banyak permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1. Kesenjangan keterampilan dan kebutuhan pasar kerja;
- 2. Kurangnya kapasitas SDM tenaga kerja;
- 3. Minat bekerja di Kabupaten Pemalang masih rendah;
- 4. Kurangnya kesejahteraan tenaga kerja;
- 5. Akses Informasi data ketenagakerjaan terbatas;
- 6. belum optimalnya pengembangan kawasan transmigrasi
- 7. Klaster dan sentra IKM belum saling terhubung antara pelaku usaha, pemasok, pasar, dan lembaga pendukung;
- 8. Banyak IKM belum memiliki teknologi, SDM, dan kapasitas produksi yang mampu bersaing di pasar;
- 9. Fasilitas seperti akses jalan, listrik, air, dan tempat produksi belum memadai di banyak sentra IKM;
- 10. Minimnya inkubator bisnis atau pusat inovasi IKM di daerah.

Tabel 2.14.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5	6	7
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, serta transmigrasi	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		Penyerapan tenaga kerja rendah	Kesenjangan keterampilan dan kebutuhan pasar kerja	Kurangnya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan kerja
					Kuran gnya kapasi tas SDM tenaga kerja	Kurikulum pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri
						Kurangnya koordinasi antara Lembaga pendidikan, perusahaan dan instansi terkait
						Kurangnya pelatihan teknis terkait produk baik kualitas maupun kuantitas (manajemen)
						Kurangnya pelatihan terkait manajemen keuangan, pemasaran, dan lain-lain
					Minat bekerja di Kabupaten	Belum meratanya pencari kerja yang mengikuti pelatihan (Sarpras Pelatihan)
						UMK yang masih tergolong rendah serta banyak perusahaan yang belum menerapkan

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
					Pemalang masih rendah	struktur skala upah
						Pola pikir masyarakat yang masih menganggap kerja di Ibu kota jauh lebih baik
						Lemahnya mentalitas tenaga kerja sekarang serta rendahnya soft skill tenaga kerja
					Kurang nya kesejahteraan tenaga kerja	Masih rendahnya pemahaman perusahaan terhadap aturan dan perundangan ketenagakerjaan
						Minimnya peluang untuk meningkatkan jenjang karier (terutama di bidang industri)
						Kurangnya peningkatan kapasitas SDM tenaga kerja di perusahaan
					Akses Informasi terbatas	Belum adanya system informasi ketenagakerjaan (BKO/Bursa Kerja Online)
						Belum semua perusahaan menyampaikan informasi terkait lowongan kerja ke Disnaker
						Belum terintegrasinya data pencari kerja dengan sistem informasi pasar kerja
					Belum optimalnya pengembangan kawasan transmigrasi.	• Jumlah kuota transmigrasi ditentukan oleh pemerintah pusat • Penempatan tidak sesuai: Banyak transmigran ditempatkan di daerah yang belum siap infrastruktur atau kurang subur untuk pertanian. • banyak daerah tujuan transmigrasi masih miskin fasilitas, sehingga transmigran sulit berkembang; • Banyak transmigran

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
						tidak memiliki keterampilan bertani atau berdagang di lingkungan baru, dan akhirnya gagal mandiri setelah bantuan habis
	Perizinan	a.Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah. b.Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. c.Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota .	a.Jumlah IUI Kecil dan Menengah yang diterbitkan per tahun. b. Persentase pelaku industri kecil dan menengah (IKM) yang telah memiliki IUI. c. Jumlah pelatihan/sosialisasi terkait IUI yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.	Belum optimalnya pertumbuhan IKM, perkembangan klaster atau perkembangan sentra.	Belum Terbangunnya Ekosistem Industri yang Terintegrasi	• Klaster dan sentra belum saling terhubung antara pelaku usaha, pemasok, pasar, dan lembaga pendukung. • Banyak IKM belum memiliki teknologi, SDM, dan kapasitas produksi yang mampu bersaing di pasar. • Fasilitas seperti akses jalan, listrik, air, dan tempat produksi belum memadai di banyak sentra. • Minimnya inkubator bisnis atau pusat inovasi di daerah.

2.2.2. Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang.

Isu strategis pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang terkait dengan pelaksanaan fungsi Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang adalah Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi , maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis, baik yang berasal dari internal maupun eksternal

Berdasarkan gambaran kondisi dan hasil identifikasi permasalahan dan telaah visi misi Kabupaten Pemalang diatas, maka isu strategis yang kita hadapi pada 5 (lima) tahun yang akan datang adalah Penyerapan tenaga kerja rendah.

Tabel 2.15.
Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat at Daerah	ISU KLHS yang Relevan dengan Perangkat at Daerah	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	1. Kesenjangan keterampilan dan kebutuhan pasar kerja; 2. Kurangnya kapasitas SDM tenaga kerja; 3. Minat bekerja di Kabupaten Pematang masih rendah; 4. Kurangnya kesejahteraan tenaga kerja; 5. Akses Informasi terbatas; 6. belum optimalnya pengembangan kawasan transmigrasi	Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah	1. Transformasi Digital & Otomatisasi	1. Pengangguran & Angkatan Kerja Muda	1. Isu Perdagangan Manusia & Buruh Migran	Penyerapan tenaga kerja rendah
			- Pergeseran jenis pekerjaan akibat otomatisasi.	Tingkat pengangguran tinggi, khususnya di kalangan lulusan muda dan SMK.		

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	ISU KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
- Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. - Sertifikasi dan peningkatan skill sesuai kebutuhan industri lokal.			2. Pekerja Layak dan Upah Minimum -Banyak negara belum menyediakan pekerjaan layak sesuai standar ILO. -Isu ketimpangan upah antara negara maju dan berkembang. 3. Pekerja Migran & Eksploitasi	Mismatch antara lulusan pendidikan dan kebutuhan industri. 2. Upah Minimum & Kesejahteraan Buruh o Perbedaan tentang sistem pengupahan yang adil dan layak. o Isu pesangon, PHK massal, dan perlindungan sosial.	Masalah trafficking dan buruh paksa masih marak di sektor pertanian, perikanan, dan konstruksi.	
2. Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja			- Perlindungan hukum lemah bagi pekerja migran. - Eksploitasi, perdagangan manusia, dan kondisi kerja tidak manusiawi.	3. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) o Banyak kasus kekerasan, overwork, dan pemotongan gaji pada PMI. o Belum banyak pelatihan kompetensi bagi CPMI;		

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	ISU KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
· Job matching antara pencari kerja dengan industri lokal. · Pembukaan lowongan kerja melalui bursa kerja daerah. · Mendorong padat karya produktif di sektor informal 3. Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja · Pengawasan terhadap perusahaan terkait pemenuhan hak pekerja (upah, jam kerja, keselamatan kerja, dll). · Mengangani perselisihan hubungan industrial di wilayahnya. · Penyuluhan norma ketenagakerjaan ke perusahaan-perusahaan lokal. 4. Pengembangan Kewirausahaan dan UMKM · Mendorong wirausah				o Ketidakjelasan aturan / regulasi tentang PMI		

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	ISU KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
a baru berbasis potensi daerah. · Fasilitas modal kerja, pelatihan manajemen usaha, dan pemasaran produk lokal. 5.Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal · Mendorong perusahaan agar mengutamakan tenaga kerja lokal. · Kerja sama dengan industri untuk menyerap lulusan lokal. · Pendataan potensi dan kebutuhan tenaga kerja daerah. 6. Data dan Informasi Ketenagakerjaan · Pemetaan potensi ketenagakerjaan (jumlah pencari kerja, lulusan, tenaga kerja terampil). · Sistem informasi ketenagakerjaan daerah (job fair,						

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	ISU KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
website lowongan kerja, dll). a. pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri; b. Pembinaan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah ;	 Keterbatasan data terkait Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri Rendah daya saing IKM	 Belum optimalnya penyiapan dan pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan IKM	 Ekspansi perusahaan global ke kawasan asia tenggara Produk-produk IKM global semakin banyak di pasaran	 Ekspansi perusahaan besar ke kawasan Jawa Tengah 1. Standarisasi produk dan kewajiban TKDN Industri hijau untuk mendukung ekonomi berkelanjutan	 Adanya kawasan industri di daerah sekitar Persaingan produk IKM antar daerah yang semakin ketat	 Belum optimalnya penyediaan data dan pengembangan IKM serta sentra/klaster IKM

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029.

Dalam RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 ditetapkan Visi Kabupaten Pemalang adalah Pemalang BERCAHAYA (BERSIH, CAKAP, HANDAL DAN MULYA).

1. BERSIH

Mengandung arti bahwa Pemalang menjadi Kabupaten yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan;

2. CAKAP

Dimaknai Pemalang memiliki sumber daya manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan masyarakat pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya;

3. HANDAL

Dimaknai kolaborasi pasangan pemimpin yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.

4. MULYA

Artinya maju, unggul, lestari dan berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius.

Visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030 dijabarkan dalam beberapa misi untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan yang mendukungnya. Misi dalam perencanaan pembangunan memiliki beberapa fungsi antara lain : mengarahkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai visi, mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan ke dalam satu kesatuan yang utuh, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Adapun misi yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. RESIK

Artinya menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Masyarakat Kabupaten Pemalang mempunyai budaya hidup bersih, kesadaran untuk mewujudkan lingkungan yang bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga, termasuk pengelolaan sampah yang baik.

2. HIJAU

Artinya meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan. Meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sektor unggulan, mewujudkan ekonomi hijau yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas yang ramah lingkungan, industri hijau yang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM yang mampu menjadi UMKM yang mampu mengolah sampah yang dihasilkan.

3. APIK

Mewujudkan Kabupaten Pemalang yang dikelola dengan baik dan ramah, menciptakan penataan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan pemukiman kumuh yang dilaksanakan mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.

4. PEDULI

Mewujudkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat, mewujudkan kualitas SDM dari sisi pendidikan dan kesehatan untuk menjadi SDM yang memiliki karakter dan berprestasi.

5. SILATURAHMI

Mewujudkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera. Pemerintah Kabupaten Pemalang meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, saling menghormati dan tepa selira.

6. ORGANISATORIS

Mewujudkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Dengan kata lain, Pemerintah Kabupaten Pemalang mewujudkan good governance, clean governance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.

7. DIGITALISASI

Memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar. Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan reformasi birokrasi.

8. IKHLAS

Artinya menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat pemalang untuk semua kalangan. Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman dan aman dalam kehidupan spiritual, mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang yang memiliki Urusan Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi maka masuk dalam **VISI MULYA** Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas

lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius dan **VISI CAKAP** dimaknai memiliki sumber daya manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.

Dan masuk **Misi Silaturahmi** : Meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera

Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro dan masuk **Misi Hijau** : Meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan, **Misi Apik** : Meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah, **Misi Digitalisasi** : Memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar.

12 PROGRAM PRIORITAS

1. Seragam sekolah dan LKS Gratis
2. Jalan halus merata
3. Revitalisasi penyediaan air bersih dari hulu sampai hilir
4. Penyediaan lapangan kerja melalui program padat karya
5. Bantuan modal usaha untuk UMKM
6. WIFI gratis tiap desa
7. Satu ambulance, satu desa
8. Jaminan ketersediaan bibit unggul dan pupuk murah
9. Bantuan kendaraan operasional pondok pesantren
10. Insentif untuk guru honorer, TPQ, Madin dan Marbot
11. Santunan kematian Rp 3.000.000,-
12. Pembukaan Pintu Tol Sewaka

Dari 12 program prioritas Bapak Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang adalah Program Santunan Kematian.

Tahun 2025 merupakan tahun awal kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029, sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Bupati – Wakil Bupati **“PEMALANG BERCAHAYA”** dan Misi **“RHAPSODI”** yang ada di RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, ditetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang.

Tujuan merupakan penjabaran Kewenangan Perangkat Daerah yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Pembangunan jangka menengah Daerah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai. Tujuan

merupakan suatu kondisi yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan atau pada saat masa Renstra PD ini berakhir. Sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi jangka pendek yang harus diwujudkan guna mencapai tujuan yang dirumuskan.

3.1.1. Tujuan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi, Kabupaten Pemalang

Tujuan daerah sesuai yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat.
2. Meningkatkan daya saing pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel (T2) dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi .

Sedangkan Tujuan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang sesuai misi Bupati Pemalang yaitu **“Silaturahmi, Hijau, dan Apik”** adalah Meningkatnya kualitas penanganan pengangguran dan Meningkatnya peran koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian dalam perekonomian daerah.

3.1.2. Sasaran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi kabupaten Pemalang.

Sedangkan sasaran Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang adalah :

1. meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas perangkat daerah;
2. Meningkatnya kualitas kompetensi, penempatan dan hubungan industrial;
3. Meningkatnya jumlah Industri Kecil Menengah

Selanjutnya rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang akan tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATO R	Satu an	Kond isi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Kondis i Akhir Renstr a	Strategi	Kebijakan	Progra m
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VISI : MULYA dan CAKAP			Indikator T1												
MISI:SILA TURAHMI Meningkat nya penangan an pengangg uran dan Meningk atnya daya saing ekonomi daerah yang bertump u pada potensi ekonomi lokal	Meningkat nya kualitas penangana nan penganggu ran dan kontribusi industri dalam perekonom ian daerah		Tigkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	72,24	72, 6	72,96	73,32	73,6 8	74,0 5	74,4 1	74,41	a. Meningkatkan Pembinaan dan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) melalui Pembinaan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	a. Melakukan penyusunan rencana tenaga kerja daerah dan pembinaanya baik secara Makro dan Mikro	Progra m Perenca naan Tenaga Kerja

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Kondisi Akhir Renstra	Strategi	Kebijakan	Program
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		S1.1 Meningkatnya kualitas kompetensi, penempatan dan hubungan industrial	Indikator S1.1 Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	%	27,13	27,39	27,65	27,92	28,19	28,46	28,73	28,73	b. Peningkatan kapasitas calon tenaga kerja melalui pelatihan baik berbasis kompetensi, berbasis kewirausahaan maupun berbasis masyarakat;	b. Peningkatan kesempatan kerja dan kapasitas calon tenaga kerja;	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
													c. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan untuk mendukung perencanaan dalam penciptaan kesempatan kerja;	c. Optimalisasi pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan;	
													d. Meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja melalui pelatihan baik berbasis kompetensi maupun berbasis kewirausahaan	d. Peningkatan ketrampilan tenaga kerja baik berbasis kompetensi maupun berbasis kewirausahaan	
													e. Peningkatan kinerja lembaga pelatihan swasta, perusahaan kecil dan	e. Peningkatan pengetahuan pengelola Lembaga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATO R	Satu an	Kond isi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Kondis i Akhir Renstr a	Strategi	Kebijakan	Progra m
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
													tenaga kerja melalui pembinaan lembaga pelatihan swasta, dan peningkatan pengetahuan;	Latihan kerja sesuai standar kurikulum Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang ditentukan;	
													f.Meningkatkan sarana dan prasarana BLK sesuai dengan kebutuhan	f. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana BLK sesuai kebutuhan	
													g.Pembinaan dan penilaian kinerja lembaga pelatihan kerja swasta	g. Percepatan Lembaga Latihan kerja swasta memiliki status akreditasi	
													h.Peningkatan SDM kapasitas Lembaga pelatihan kerja swasta dengan mendorong lembaga pelatihan kerja swasta memiliki perijinan dan akreditasi.	h.Peningkatan kemampuan instruktur Lembaga pelatihan kerja pemerintah dan swasta.	
													i.Meningkatkan penempatan tenaga	i.Peningkatan perluasan kesempatan	Progra m Penemp

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATO R	Satu an	Kond isi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Kondis i Akhir Renstr a	Strategi	Kebijakan	Progra m
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
													kerja di dalam dan luar negeri	kerja dan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri	atan Tenaga Kerja
													j.Meningkatkan penyebaran informasi kesempatan kerja di dalam dan luar negeri baik melalui Bursa Kerja On Line (BKO), Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Job Fair Expo;	j.Memperluas akses informasi pasar kerja	
													k.Meningkatkan perlindungan Pekerja Migarn Indonesia	k.Peningkatan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia	
													l.Peningkatan IMTA yang memiliki perpanjangan melalui pembinaan perusahaan yang memiliki tenaga kerja asing	l.Pembinaan perusahaan yang memiliki TKA diprioritaskan pada perusahaan dengan IMTA yang belum memiliki perpanjangan;	
													m.Meningkatkan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif	m.Menjaga dan Meningkatkan	Progra m Hubun

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATO R	Satu an	Kond isi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Kondis i Akhir Renstr a	Strategi	Kebijakan	Progra m
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
													untuk Menciptakan Hubungan Industrial Kondusif dan Harmonis, serta Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Peningkatan Koordinasi dalam Penetapan Upah Minimum, Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Bipartit dan Lembaga Kerjasama Tripartit, Mendorong Perusahaan dalam Kepesertaan Jaminan Sosial dan Fasilitas Sarana Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja Baik Diluar Maupun Didalam Hubungan Kerja	Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif untuk Menciptakan Hubungan Industrial Kondusif dan Harmonis, serta Penguatan dan Pengelolaan Data dan Informasi Hubungan Industrial dengan 46yste penetapan 46system pengupahan yang berkeadilan, pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartit dan pengesytahan peraturan perusahaan, peningkatan kepesertaan jaminan sosial.	gan Industri al

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATO R	Satu an	Kond isi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Kondis i Akhir Renstr a	Strategi	Kebijakan	Progra m
					2024	202 5	2026	2027	2028	2029	203 0				
Meningkat nya laju pertumbu han ekonomi dengan potensi ekonomi lokal		Meningkatny a jumlah IKM	Persentase pertumbuh an IKM	%	6,43	6,4 8	6,5	6,6	6,7	6,8	6.9	6,9	Meningkatkan pembinaan dan daya saing IKM	a. Peningkatan produksi dan kualitas industri unggulan b. Peningkatan unit usaha IKM dan kemitraan antar industry c. Peningkatan standarisasa i produk	Perenca naan pemban gunan industri
													n.Meningkatkan kualitas SDM pengelola transmigrasi	n. kapasitas aparap penyelenggara transmigrasi	Progra m Pemban gunan Kawasa n Transm igrasi
													o.Mengoptimalkan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar 47ystem pendukung urusan transmigrasi.	o.Optimalisasi kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor	
													p.Koordinasi antarsektor dalam pembangunan kawasan transmigrasi, baik	p.Peningkatan koordinasi antarsektor dalam pembangunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATO R	Satu an	Kond isi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Kondis i Akhir Renstr a	Strategi	Kebijakan	Progra m
					2024	202 5	2026	2027	2028	2029	203 0				
													antar pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, maupun antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait dengan kesiapan daerah penempatan	kawasan transmigrasi	
													q.Meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya transmigrasi untuk kehidupan yang lebih baik	q.Peningkatan motivasi dan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya transmigrasi untuk kehidupan yang lebih baik;	
		Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85,64	85,7	85,85	85,95	86,1	86,15	86,2	86,2	r.Perbaikan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat	r.Peningkatan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat	Progra m Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Nilai SAKIP	%	70,61	70	70	70	70	70	70	70	s.Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	s.Penyusunan dokumen perencanaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATO R	Satu an	Kond isi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Kondis i Akhir Renstr a	Strategi	Kebijakan	Progra m
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
													dokumen perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	dan penganggaran yang sinergis dengan kebijakan pemerintah pusat, dan provinsi serta penyusunan berbagai laporan kinerja sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan	

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1. Strategi

Strategi adalah merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029.

Sedangkan arah kebijakan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Nilai, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang.

Strategi Pemerintah Kabupaten Pemalang yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 terkait dengan sasaran daerah Meningkatnya penanganan pengangguran adalah :

1. peningkatan kompetensi tenaga kerja dan mendorong kebijakan hubungan industrial yang baik
2. Menyusun kebijakan dalam meningkatkan upah tenaga kerja dan penggunaan tenaga kerja lokal.
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam penempatan kerja dan pencarian tenaga kerja.
4. Melakukan kerja sama dengan provinsi dan kabupaten sekitar dalam mendorong penempatan tenaga kerja.
5. Mendorong sekolah vokasi tingkat menengah (SMK), serta perguruan tinggi di Kabupaten Pemalang.
6. Keterampilan yang dibangun dalam sekolah vokasi disesuaikan dengan kebutuhan industri di Kabupaten Pemalang dan sekitarnya.
7. Melakukan kolaborasi dengan SMK/vokasi dalam penyerapan dan penempatan tenaga kerja. Pemenuhan jaminan perlindungan sosial pada ketenagakerjaan.
8. peningkatan industri yang ramah lingkungan dalam mendorong ekonomi hijau
9. Peningkatan akuntabilitas Pembangunan melalui peningkatan kualitas perencanaan, kinerja dan pelaporan;
10. Peningkatan maturitas sistem pengendalian intern melalui peningkatan komitmen pemerintah dalam menjalankan Pembangunan, penguatan kebijakan dan regulasi,

peningkatan kapabilitas APIP, peningkatan kualitas dan profesionalisme pegawai, penguatan manajemen resiko, digitalisasi serta evaluasi berkelanjutan.

11. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP), mewujudkan pelayanan berbasis digital, mudah dan murah.

Sedangkan arah kebijakan yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 terkait dengan sasaran daerah Meningkatnya penanganan pengangguran Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang memiliki daya saing sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Selaras dengan strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang tercantum pada dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 maka Strategi Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah

- a. Peningkatan Pembinaan dan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) melalui Pembinaan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro ;
- b. Peningkatan kapasitas calon tenaga kerja melalui pelatihan baik berbasis kompetensi, berbasis kewirausahaan maupun berbasis masyarakat;
- c. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan untuk mendukung perencanaan dalam penciptaan kesempatan kerja;
- d. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja melalui pelatihan baik berbasis kompetensi maupun berbasis kewirausahaan;
- e. Peningkatan kinerja lembaga pelatihan swasta, perusahaan kecil dan tenaga kerja melalui pembinaan lembaga pelatihan swasta, dan peningkatan pengetahuan;
- f. Peningkatan sarana dan prasarana BLK sesuai dengan kebutuhan
- g. Pembinaan dan penilaian kinerja lembaga pelatihan kerja swasta
- h. Peningkatan SDM kapasitas Lembaga pelatihan kerja swasta dengan mendorong lembaga pelatihan kerja swasta memiliki perijinan dan akreditasi.
- i. Peningkatan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri
- j. Peningkatan penyebaran informasi kesempatan kerja di dalam dan luar negeri baik melalui Bursa Kerja On Line (BKO), Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Job Fair Expo;
- k. Peningkatan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- l. Peningkatan IMTA yang memiliki perpanjangan melalui pembinaan perusahaan yang memiliki tenaga kerja asing.

- m. Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif untuk Menciptakan Hubungan Industrial Kondusif dan Harmonis, serta Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Peningkatan Koordinasi dalam Penetapan Upah Minimum, Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Bipartit dan Lembaga Kerjasama Tripartit, Mendorong Perusahaan dalam Kepesertaan Jaminan Sosial dan Fasilitas Sarana Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja Baik Diluar Maupun Didalam Hubungan Kerja;
- n. Mendorong inovasi produk dan ekspansi ke pasar Internasional untuk meningkatkan daya saing;
- o. Perijinan
Pemantauan dan pengawasan terhadap Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait untuk memastikan penggunaan izin sesuai peruntukkan;
- p. Pendataan
Pengumpulan dan pengolahan data industri untuk menjamin tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini;
- q. Pengembangan kluster
Pengembangan kluster untuk memperkuat perekonomian lokal dan meningkatkan daya saing sektor industri secara keseluruhan.
- r. Integrasi SIINAS
Peningkatan kepatuhan perusahaan industri dalam menyampaikan pelaporan data industri melalui SIINAS
- s. Peningkatan kapasitas sumber daya industri sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing industri secara keseluruhan;
- t. Penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan Sentra Industri
- u. Peningkatan pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
- v. Peningkatan fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
- w. Peningkatan kualitas SDM pengelola transmigrasi;
- x. Mengoptimalkan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar system pendukung urusan transmigrasi.
- y. Koordinasi antarsektor dalam pembangunan kawasan transmigrasi, baik antar pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, maupun antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait dengan kesiapan daerah penempatan

- z. Meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya transmigrasi untuk kehidupan yang lebih baik
- aa. pembinaan perusahaan yang memiliki tenaga kerja asing
- bb. Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif untuk Menciptakan Hubungan Industrial Kondusif dan Harmonis, serta Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Peningkatan Koordinasi dalam Penetapan Upah Minimum, Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Bipartit dan Lembaga Kerjasama Tripartit, Mendorong Perusahaan dalam Kepesertaan Jaminan Sosial dan Fasilitas Sarana Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja Baik Diluar Maupun Didalam Hubungan Kerja;
- cc. Peningkatankualitas SDM pengelola transmigrasi;
- dd. Mengoptimalkan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar system pendukung urusan transmigrasi.
- ee. Koordinasi antarsektor dalam pembangunan kawasan transmigrasi, baik antar pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, maupun antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait dengan kesiapan daerah penempatan
- ff. Meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya transmigrasi untuk kehidupan yang lebih baik
- gg. Perbaikan kualitas pelayanan prima kepada Masyarakat
- hh. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dokumen perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan;

Dalam rangka mencapai strategi di atas maka pentahapan strategi setiap tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Penahapan Renstra Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang

TAHAP I (2026)	TAHAP I (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan pondasi ketenagakerjaan, perindustrian dan transmigrasi	Pengembangan kapasitas SDM Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Transmigrasi	Akselerasi dan inklusifitas pelayanan ketenagakerjaan, perindustrian dan transmigrasi	Konsolidasi dan evaluasi capaian kinerja ketenagakerjaan, perindustrian dan transmigrasi	Pemantapan dan keberlanjutan program ketenagakerjaan, perindustrian dna transmigrasi
• pemetaan tenaga kerja, • penyusunan data base dan sistem informasi tenaga kerja, • sosialisasi program pelatihan dan penempatan kerja,	Pengembangan SDM dan peningkatan akses kerja melalui - pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan	- Peningkatan skala dan cakupan pelatihan ke wilayah terjauh, - penerapan teknologi digital untuk layanan ketenagakerjaan (Job	Konsolidasi dan evaluasi capaian melalui - evaluasi menyeluruh capaian indikator kinerja ketenagakerjaan, - replikasi program unggulan di daerah lain, - optimalisasi pelibatan	- Pemantapan dan keberlanjutan program tenaga kerja yang berhasil, - penyusunan program tenaga kerja, - penerapan tenaga kerja di sektor

• peningkatan kapasitas kelembagaan BLK dan penguatan lembaga tripartit (Pengusaha, Pemerintah dan Pekerja; • Konsolidasi data dan pemetaan industri. • Penataan kelembagaan Sentra IKM • Penyusunan roadmap pengembangan IKM berbasis potensi lokal. • Peningkatan kepatuhan industri terhadap SIINAS	- kebutuhan pasar, - sertifikasi tenaga kerja, - penguatan kemitraan dengan sektor swasta untuk pemagangan, pengembangan wirausaha baru berbasis tenaga kerja lokal dan - peningkatan layanan informasi bursa kerja. - Pembinaan hubungan industrial - Peningkatan kompetensi SDM IKM - Peningkatan kualitas produk IKM melalui sertifikasi, standarisasi, dan branding	- Matching (Online), - pelatihan bisnis tenaga kerja muda, - pemberdayaan kelompok rentan (difabel, perempuan, buruh migran) dan - penguatan pembinaan perusahaan dan norma kerja. - Promosi dan pemasaran produk unggulan daerah secara lebih luas. - Fasilitasi keikutsertaan IKM dalam <i>business matching</i> - Penguatan jejaring kemitraan usaha dan rantai pasok. - Pengembangan sistem distribusi dan logistik terpadu.	- sektor swasta dan lembaga pelatihan kerja dan - integrasi program lintas sektor (pendidikan, sosial, koperasi). - evaluasi menyeluruh capaian indikator kinerja per industri, replikasi program unggulan di daerah lain, optimalisasi pelibatan sektor swasta dan integrasi program lintas sektor.	- strategis dan hijau, - peningkatan kontribusi sektor ketenagakerjaan pada Pertumbuhan Ekonomi daerah, penguatan reformasi kelembagaan dan peraturan daerah ketenagakerjaan; - Pemantapan ekosistem usaha yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan - Implementasi prinsip ekonomi hijau dalam pembangunan industri - Peningkatan kontribusi sektor perindustrian pada Pertumbuhan Ekonomi daerah,
--	---	--	--	---

1. Tahap I Tahun 2026

Penguatan pondasi ketenagakerjaan, perindustrian dan transmigrasi

Penguatan pondasi ketenagakerjaan melalui

- pemetaan tenaga kerja,
- penyusunan data base dan sistem informasi tenaga kerja,
- sosialisasi program pelatihan dan penempatan kerja,
- peningkatan kapasitas kelembagaan BLK dan penguatan lembaga tripartit (Pengusaha, Pemerintah dan Pekerja;
- Konsolidasi data dan pemetaan industri.
- Penataan kelembagaan Sentra IKM
- Penyusunan roadmap pengembangan IKM berbasis potensi lokal.
- Peningkatan kepatuhan industri terhadap SIINAS

2. Tahap II Tahun 2027

Pengembangan kapasitas SDM Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Transmigrasi

- melalui pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan kebutuhan pasar,
- sertifikasi tenaga kerja,
- penguatan kemitraan dengan sektor swasta untuk pemagangan,
- pengembangan wirausaha baru berbasis tenaga kerja lokal dan

- peningkatan layanan informasi bursa kerja.
- Pembinaan hubungan industrial
- Peningkatan kompetensi SDM IKM
- Peningkatan kualitas produk IKM melalui sertifikasi, standarisasi, dan branding

3. Tahap III Tahun 2028

Akselerasi dan inklusifitas pelayanan ketenagakerjaan, perindustrian dan transmigrasi

- Peningkatan skala dan cakupan pelatihan ke wilayah terjauh
- penerapan teknologi digital untuk layanan ketenagakerjaan (Job Matching Online),
- pelatihan bisnis tenaga kerja muda,
- pemberdayaan kelompok rentan (difabel, perempuan, buruh migran) dan
- penguatan pembinaan perusahaan dan norma kerja.
- Promosi dan pemasaran produk unggulan daerah secara lebih luas.
- Fasilitasi keikutsertaan IKM dalam *business matching*;
- Penguatan jejaring kemitraan usaha dan rantai pasok.
- Pengembangan sistem distribusi dan logistik terpadu.

4. Tahap IV Tahun 2029

Konsolidasi dan evaluasi capaian kinerja ketenagakerjaan, perindustrian dan transmigrasi

Konsolidasi dan evaluasi capaian melalui

- evaluasi menyeluruh capaian indikator kinerja ketenagakerjaan,
- replikasi program unggulan di daerah lain,
- optimalisasi pelibatan sektor swasta dan lembaga pelatihan kerja dan
- integrasi program lintas sektor (pendidikan, sosial, koperasi);
- evaluasi menyeluruh capaian indikator kinerja perindustrian,
- replikasi program unggulan di daerah lain,
- optimalisasi pelibatan sektor swasta dan integrasi program lintas sektor.

5. Tahap V Tahun 2023

Pemantapan dan keberlanjutan program ketenagakerjaan, perindustrian dan transmigrasi

- Pemantapan dan keberlanjutan program tenaga kerja yang berhasil;
- penyusunan program tenaga kerja;
- penerapan tenaga kerja di sektor strategis dan hijau;
- peningkatan kontribusi sektor ketenagakerjaan pada Pertumbuhan Ekonomi daerah:

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NPSK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
	Misi Silaturahmi : meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera	Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang memiliki daya saing sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; Pengembangan industri kecil menengah dengan penguatan sentra/ kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital;	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja - Yang meliputi peningkatan kompetensi melalui pendidikan, dan pelatihan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang. - Revitalisasi dan peningkatan peran BLK (Balai Latihan Kerja). Pemerataan Kesempatan Kerja Yaitu menciptakan kesempatan kerja yang merata di berbagai wilayah dan sektor, melalui Peningkatan Kualitas Kinerja Lembaga Penempatan Tenaga Kerja, Optimalisasi Fungsi Pengantar Kerja, Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja , Pelayanan Anatar Kerja Perlindungan Tenaga Kerja dalam dan Luar Negeri	
			Perlindungan Tenaga Kerja • Penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). • Peningkatan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).	
			Peningkatan Kesejahteraan Pekerja melalui peningkatan upah, jam kerja, keselamatan kerja maupun peningkatan kualitas hidup pekerja.	
			Pengembangan Hubungan Industrial yang Harmonis dan Berkeadilan Arah kebijakan ini menekankan pentingnya komunikasi dan dialog yang baik antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan produktif.	

			Pemanfaatan Teknologi dan data Terintegrasinya system informasi pasar kerja Peningkatan penempatan dan Kesejahteraan Transmigrasi Meningkatkan Koordinasi dan Integrasi Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Tujuan Transmigrasi (Kurang Perindustrian)	
			Peningkatan produksi dan kualitas industri unggulan Ditempuh dengan cara pemetaan potensi unggulan daerah yang dapat dijadikan produk industri melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, fasilitasi dan pemberian subsidi mesin industri bagi IKM	
			Peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan antar industri Untuk mencapai hal ini ditempuh dengan cara fasilitasi dan pendampingan dalam proses perizinan dan legalitas usaha, fasilitasi kerjasama antara industri, business matching	
			Peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan antar industri Untuk mencapai hal ini ditempuh dengan cara fasilitasi dan pendampingan dalam proses perizinan dan legalitas usaha, fasilitasi kerjasama antara industri, business matching	

Selain itu terkait dengan kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Pemalang berpotensi menjadi migran center di Jawa Tengah. Ini berarti Pemalang akan menjadi pusat layanan dan informasi bagi pekerja migran, mulai dari persiapan sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga kepulangan mereka ke tanah air. Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, telah mengarahkan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi untuk mempersiapkan diri menjadi migran center.

Migran Center adalah pusat layanan terpadu yang menyediakan informasi, pelatihan, dan pendampingan bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan PMI yang akan, sedang, atau telah bekerja di luar negeri. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan, meningkatkan kompetensi, dan mencegah praktik penipuan terkait migrasi.

Upaya Yang Dilakukan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Dalam Rangka Optimalisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

1. Melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga (PKSDPK) dengan Serikat Buruh Migran Indonesia di Jakarta melalui Pembentukan MRC (Migrant Worker Resources Center) yang telah dilaunching oleh Bapak Bupati Pemalang pada tanggal 1 Mei 2024 dalam rangka untuk Optimalisasi Tata Kelola Pelindungan bagi PMI dan Keluarga PMI di Kabupaten Pemalang.
2. Pengajuan Proposal Pembangunan Gedung Vokasi Pelatihan bagi Pekerja Migran Indonesia ke Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
3. Merintis Kerja Sama dengan Badan Pelindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di Semarang terkait Optimalisasi Pelayanan Terhadap PMI dan Keluarga PMI di Kabupaten Pemalang.
4. Optimalisasi Pelayanan ID Rekom bagi CPMI asal Kabupaten Pemalang yang akan ditempatkan bekerja di Luar Negeri.
5. Pembinaan dan Sosialisasi secara intensif kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Manning Agency yang berada di wilayah Kab. Pemalang.
6. Melakukan Sosialisasi ke masyarakat di desa-desa wilayah Kabupaten Pemalang Terkait Mekanisme dan Persyaratan untuk menjadi PMI yang legal dengan menggandeng MRC, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan baik secara langsung maupun melalui media sosial yang ada di Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang.
7. Penyusunan Data Base Ketenagakerjaan khususnya pada Tata Kelola Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang baik.
8. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Kegiatan dan Operasional pada P3MI dan Manning Agency yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang.
9. Melakukan pendampingan bagi Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Pemalang yang kembali ke Kabupaten Pemalang karena telah selesai menjalani masa kerja, sakit, yang meninggal dunia maupun yang mendapatkan masalah di Luar Negeri dan membantu dalam proses pemulangannya serta membantu proses pemberian santunan/asuransi.
10. Berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang untuk membentuk unit layanan khusus bagi PMI di Kabupaten Pemalang dalam hal Medical Check

Up (MCU) sehingga dapat memberikan pendapatan bagi daerah (PAD).

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan SubKegiatan

Sesuai dengan Permendagri Nomot 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dann sasaran, serta strategi pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langka rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029), meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program yang dilaksanakan meliputi urusan wajib ketenagakerjaan dan urusan pilihan transmigrasi. Program ini merupakan penjabaran kebijakan strategis Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang yang akan dilaksanakan mencakup proogram pokok :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja;
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja;
3. Program Penempatan Tenaga Kerja;
4. Program Hubungan Industrial;
5. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
8. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Untuk mendukung program pokok tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar, akan dilaksanakan program-program penunjang yang meliputi :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adalah aktivitas yang merupakan penjabaran dari program yang dibuat oleh suatu instansi pemerintah. Kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan yang disusun secara tahunan ini menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program yang berdimensi waktu 5 (lima) tahun. Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah :

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
 - a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
 - b. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
2. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - a. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
 - b. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
 - c. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
3. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - a. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
4. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
 - a. Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi

5. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
 - a. Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
6. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
7. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
 - b. Pelayanan antar Kerja
 - c. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
 - d. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
 - e. Perluasan Kesempatan Kerja
8. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi
 - b. Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
9. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - a. Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online;
 - b. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 - c. Job Fair/Bursa Kerja
10. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota;
 - a. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
 - b. Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran.
 - c. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
11. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
12. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
 - b. Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
 - c. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
13. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
 - d. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

- e. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
- 14. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri;
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
 - d. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat;
 - e. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri;
 - f. Rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industry;
- 15. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota;
 - c. Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui sistem informasi industri nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
- 16. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - a. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
- 17. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Penyuluhan Transmigrasi
 - d. Pelatihan Transmigrasi
- 18. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 19. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 20. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 21. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 22. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - d. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 23. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 24. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Mebel
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

Dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, ditetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang dengan disertai kebutuhan pendanaannya indikatif tersaji pada tabel 4.1. sebagai berikut (Terlampir) :

Tabel 4.1

Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM.KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
VISI MULYA MISI SILATURAHMI Meningkatny a penanganan penganggura n dan Meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal	Meningkatnya kualitas penangananan pengangguran dan kontribusi industri dalam perekonomian daerah	Meningkatnya kualitas kompetensi, penempatan dan hubungan industrial dan Meningkatnya jumlah Industri Kecil Menengah	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		Tujuan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sasaran Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
			Persentase Tersusunnya Dokumen Rencana Tenaga Kerja mikro dan makro			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
				Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
				Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	
			Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			Prosentase pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
				Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	

				Berbasis Kompetensi pada Tahun n		Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
				Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	
				Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	
				Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	
				Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas		Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	
				Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	
			Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang terakreditasi			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
				Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	

			Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang berizin			Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	
				Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi		Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	
			Persentase Perusahaan kecil/UMKM yang mendapatkan pembinaan produktivitasnya			Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	
				Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	
			Prosentase perusahaan yang diberikan pembinaan pengukuran produktifitas			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	
			Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				Jumlah pencari kerja yang ditempatkan		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	
						Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	

				Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL		Pelayanan antar Kerja	
				Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	
				Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	
				Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja		Perluasan Kesempatan Kerja	
			Prosentase Lembaga penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang terfasilitasi dengan baik			Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi		Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	
				Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku		Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	
			Jumlah pencari kerja yang mengakses informasi bursa kerja			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
				Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	
				Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	

				Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)			
				Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		Job Fair/Bursa Kerja	
			Prosentase Pekerja Migran Indonesia yang dilindungi			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
				Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani		Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	
				Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	
			Prosentase perusahaan yang mematuhi peraturan penggunaan Tenaga Kerja Asing			Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah perusahaan yang dimonitoring penggunaan Tenaga Kerja Asing		Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	

			terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)				
			Prosentase perusahaan yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
				Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama		Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	
				Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
			Prosentase perselisihan hubungan industrial perusahaan yang ditangani dan terbinanya perusahaan yang mengikuti jaminan sosial			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Perselisihan yang Dicegah		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	

						Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	
				Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
		Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah (IKM)	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian		% izin usaha industri yang diterbitkan	Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Data perizinan industri yang diterbitkan oleh Kabupaten/Kota diintegrasikan dengan SIINas	Jumlah usulan ijin usaha yang diterbitkan / mendapat rekomendasi	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan	

						Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri		% Ketersediaan informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
				Tersediannya data industri yang valid dan terkini (up to date)	Jumlah unit industri terdata dalam sistem	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Persentase transmigran yang ditempatkan			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			Jumlah transmigran yang ditempatkan			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota	
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota	
				Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan		Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota	
				Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan		Penyuluhan Transmigrasi	
				Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan		Pelatihan Transmigrasi	
		Meningkatnya kinerja	Nilai SAKIP		Prosentase dokumen perencanaan, keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	

		Pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah			dan evaluasi sesuai regulasi	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah berita acara hasil forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Pelaksanaan forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan peranagkat daerah	
			Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	
			Indeks Kepuasan Masyarakat		Prosentase layanan dan kepegawaian yang terpenuhi		
			Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Persentase Fasilitas Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu		Fasilitas kunjungan tamu	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

			Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah unit kendaraan operasional atau lapangan yang disediakan		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Pengadaan Mebel	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			Pemeliharaan Barang Milik Daerah	

			Pemerintahan Daerah yang Dipelihara			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara		Pemeliharaan Mebel	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2
Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan pendanaan
Dinas Tenaga Kerja. Perindustrian dan Transmigrasi kabupaten Pemalang

BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	Indikator Outcome/ Output	Basel ine 2024	Basel ine 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket	
				2026		2027		2028		2029		2030					
				Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
TENAGA KERJA																	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanaka n yang mengacu ke rencana tenaga kerja	-	80	100	200.000	100	170.000	100	170.000	100	170.000	100	170.000	100	170.000		
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Tersusunnya Dokumen Rencana Tenaga Kerja mikro dan makro	-	100	100	200.000	100	170.000	100	170.000	100	170.000	100	170.000	100	170.000		

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	-	1 Doku men	1 Doku men	100.000	1 Doku men	100.000	1 Doku men	100.000	1 Doku men	100.000	1 Doku men	100.000	1 Dok ume n	100.000	
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	-	1 oran g	2 Oran g	100.000	2 Oran g	70.000	2 Oran g	70.000	2 Oran g	70.000	2 Oran g	70.000	2 Ora ng	70.000	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	4,43	5,50	2.03	790.100.000	2,78	1.499.010.510	3,45	1.499.010.510	4,05	1.499.010.510	4,6	1.499.010.510	4,6	1.499.010.510	
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Prosentase pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	78,66	78,66		747.000.000		1.478.319.160		1.478.319.160		1.478.319.160		1.478.319.160		1.478.319.160	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	576 Oran g	420 oran g	420 Oran g	746.000.000	420 Oran g	1.391.319.160	420 Oran g	1.391.319.160	420 Oran g	1.391.319.160	420 Oran g	1.391.319.160	420 Ora ng	1.391.319.160	

RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG

Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan /Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	-		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaa n Sarana Pelatihan Kerja	388 oran g	17 unit	20 Unit	1.000.000	17 Unit	87.000.0 00	17 Unit	87.000.0 00	17 Unit	87.000.0 00	17 Unit	87.000.0 00	17 Unit	87.000.0 00	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG

Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas	-		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah kesepakatan /koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang terakreditasi	100 %	100	100	20.000.000	100	17.466.730	100	17.466.730	100	17.466.730	100	17.466.730	100	17.466.730	
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	41 lembaga	20 lembaga	20 Lembaga	20.000.000	20 Lembaga	17.466.730	20 Lembaga	17.466.730	20 Lembaga	17.466.730	20 Lembaga	17.466.730	20 Lembaga	17.466.730	

Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang berizin	100 %	100%	100 %	3.000.000	100%	3.024.000	100%	3.024.000	100%	3.024.000	100%	3.024.000	100 %	3.024.000	
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	6 perizinan	6 perizinan	6 Perizinan	3.000.000	6 Perizinan	3.024.000	6 Perizinan	3.024.000	6 Perizinan	3.024.000	6 Perizinan	3.024.000	6 Perizinan	3.024.000	
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan kecil/UMKM yang mendapatkan pembinaan produktivitasnya	-	100%	100 %	100.000.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100 %	100.000	
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	-	1 perusahaan	1 Perusahaan	100.000	1 Perusahaan	100.000	1 Perusahaan	100.000	1 Perusahaan	100.000	1 Perusahaan	100.000	1 Perusahaan	100.000	
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase perusahaan yang diberikan pembinaan pengukuran produktivitas	-	100%	100 %	20.000.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100 %	100.000	

RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG

Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	-	1 dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	59%	72	73,13	796.100.000	73,83	2.000..131.930	74,54	2.000..131.930	75,26	2.000..131.930	75,98	2.000..131.930	75,98	2.000..131.930	
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	8.000 orang		8.000	781.100.000	8.000	1.421.803.930	8.000	1.421.803.930	8.000	1.421.803.930	8.000	1.421.803.930	8.000	1.421.803.930	
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

	Peningkatan Kompetensi															
Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	7.500 orang	7.500 orang	8500 Orang	40.000.000	7500 Orang	57.636.600	7500 Orang	57.636.600	7500 Orang	57.636.600	7500 Orang	57.636.600	7500 Orang	57.636.600	
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	-	300 orang	400 Orang	40.000.000	300 Orang	65.376.300	400 Orang	65.376.300	400 Orang	65.376.300	400 Orang	65.376.300	400 Orang	65.376.300	
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	-	16 orang	15 Orang	100.000	16 Orang	40.759.520	15 Orang	40.759.520	15 Orang	40.759.520	15 Orang	40.759.520	15 Orang	40.759.520	
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan	180 orang	263 orang	180 Orang	701.000.000	280 orang	1.258.031.510	280 orang	1.258.031.510	280 orang	1.258.031.510	280 orang	1.258.031.510	280 orang	1.258.031.510	

	Kesempatan Kerja															
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Lembaga penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang terfasilitasi dengan baik			-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	-		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	-		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengakses informasi bursa kerja	100 penc		600	10.000.000	600	378.328.000	600	378.328.000	600	378.328.000	600	378.328.000	600	378.328.000	

RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG

Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	-		-	-	-	50.000.000 -	-	50.000.000 -	-	50.000.000 -	-	50.000.000 -	-	50.000.000 -	
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	-		-	-	-	20.000.000 -	-	20.000.000 -	-	20.000.000 -	-	20.000.000 -	-	20.000.000 -	
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 orang	500 orang	400 Orang	10.000.000	600 Orang	308.328.000	600 Orang	308.328.000	600 Orang	308.328.000	600 Orang	308.328.000	600 Orang	308.328.000	
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pekerja Migran Indonesia yang dilindungi	100 %	100%	100 %	5.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100 %	200.000.000	
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan	50 orang	20 orang	20 Orang	5.000.000	20 Orang	130.000.000	20 Orang	130.000.000	20 Orang	130.000.000	20 Orang	130.000.000	20 Orang	130.000.000	

Migran Indonesia (PMI)	Kompetensinya															
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	-		-	-	20 Oran g -	35.000.000 -	20 Oran g -	35.000.000 -	20 Oran g -	35.000.000 -	20 Oran g -	35.000.000 -	20 Oran g -	35.000.000 -	
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	-		-	-	20 Oran g -	35.000.000 -	20 Oran g -	35.000.000 -	20 Oran g -	35.000.000 -	20 Oran g -	35.000.000 -	20 Oran g -	35.000.000 -	
Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase perusahaan yang mematuhi peraturan penggunaan Tenaga Kerja Asing	-		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dimonitoring penggunaan Tenaga Kerja Asing	-		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	22,79	100%	100%	2.675.200.000	100%	2.961.595.700	100%	2.961.595.700	100%	2.961.595.700	100%	2.961.595.700	100%	2.961.595.700	
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase perusahaan yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan	100%	100%	100%	46.000.000	100%	64.856.380	100%	64.856.380	100%	64.856.380	100%	64.856.380	100%	64.856.380	
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan	10 perusahaan	10 perusahaan	10 Perusahaan	46.000.000	10 Perusahaan	64.856.380	10 Perusahaan	64.856.380	10 Perusahaan	64.856.380	10 Perusahaan	64.856.380	10 Perusahaan	64.856.380	

RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG

	Industrial dan Terdaftar di WLKP Online															
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	-		-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	-		-	-	0	0	0-	0	0	0	0	0	0	0	

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase perselisihan hubungan industrial perusahaan yang ditangani dan terbinanya perusahaan yang mengikuti jaminan sosial	100 %	100 %	100 %	2.579.200.000	100%	2.896.739.320	100%	2.896.739.320	100%	2.896.739.320	100%	2.896.739.320	100 %	2.896.739.320	
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	5 perkara	10 perkara	10 Perkara	25.000.000	10 Perkara	25.324.260	10 Perkara	25.324.260	10 Perkara	25.324.260	10 Perkara	25.324.260	10 Perkara	25.324.260	

Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	15 asosiasi dan serikat pekerja	20 Asosiasi dan Serikat Pekerja	20 Asosiasi dan Serikat Pekerja	10.000.000	20 Asosiasi dan Serikat Pekerja	7.541.540	20 Asosiasi dan Serikat Pekerja	7.541.540	20 Asosiasi dan Serikat Pekerja	7.541.540	20 Asosiasi dan Serikat Pekerja	7.541.540	20 Asosiasi dan Serikat Pekerja	7.541.540	
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	4 lembaga	5 lembaga	5 Lembaga	75.000.000	5 Lembaga	143.429.780	5 Lembaga	143.429.780	5 Lembaga	143.429.780	5 Lembaga	143.429.780	5 Lembaga	143.429.780	
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	50.375 orang	18.434 orang	12.000 Orang	2.469.200.000	12.000 Orang	2.720.443.740	12.000 Orang	2.720.443.740	12.000 Orang	2.720.443.740	12.000 Orang	2.720.443.740	12.000 Orang	2.720.443.740	
Program Perencanaan Pembangunan Industri	% peningkatan Dokumen Rencana Pembangunan Industri	100%	100%	100%	522.000.000	100%	892.390.320	100%	892.390.320	100%	892.390.320	100%	892.390.320	100%	892.390.320	

RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG

Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	18 dok mn	10 dokm n	10 dok mn	522.000.00	100%	892.390.320	100%	892.390.320	100%	892.390.320	100%	892.390.320	100 %	892.390.320	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	8 dok mn	8 doku mn	8 doku mn	42.000.000	100%	58.685.000	100%	58.685.000	100%	58.685.000	100%	58.685.000	100 %	58.685.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pelaksanaan pemanagun	1 dok mn	1 doku mn	1 doku mn	30.000.000	100%	236.570.320	100%	236.570.320	100%	236.570.320	100%	236.570.320	100 %	236.570.320	

	an sumber daya industri															
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	JUmlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industry dan peran serta masyarakat	9 dokmn	9 dokmn	9 dokmn	450.000.000	100%	597.135.00	100%	597.135.00	100%	597.135.00	100%	597.135.00	100%	597.135.00	
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri					0											

Rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri					0											
Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/Kota	% usulan ijin usaha yang mendapat rekomendasi	100 %	100%	100 %	55.000.000	100%	37.673.000	100%	37.673.000	100%	37.673.000	100%	37.673.000	100 %	37.673.000	
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sector industry dan atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah tinggi dan	2 Dkm n	2 Dkm n	2 Dkm n	55.000.000	2 Dkm n	37.673.000	2 Dkm n	37.673.0055.000.000	2 Dkm n	37.673.000	2 Dkm n	37.673.000	2 Dk mn	37.673.000	

	tinggi melalui SIINAS yang terintegrasi dengan system OSS															
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan terhadap perizinan berusaha industry kecil dan	1 dokmn	1 dokmn	1 dokmn	25.000.000	1 dokmn	15.000.000	1 dokmn	15.000.000	1 dokmn	15.000.000	1 dokmn	15.000.000	1 dokmn	15.000.000	

	industry menengah yang berlokasi di satu Kab/Kota sepanjang merupakan penanaman modal dalam negeri dan selain bidang tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat															
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui sistem informasi industri nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan/standard kegiatan usaha sector perindustria n dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko untuk bidang usaha sector perindustria n dengan tingkat resiko usaha	1 dokmn	1 dokmn	1 dokmn	30.000.000	1 dokmn	22.673.000	1 dokmn	22.673.000	1 dokmn	22.673.000	1 dokmn	22.673.000	1 dokmn	22.673.000	

	menengah-tinggi dan tinggi melalui SIINAS yang berintegrasi dengan system OSSRBA bagi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan skala usaha industry kecil dan industry menengah selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat															
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	% Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	100	100	100	79.800.000	100	54.548.000	100	54.548.000	100	54.548.000	100	54.548.000	100	54.548.000	
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Jumlah unit industri terdata dalam sistem	3 dokmn	3 dokmn	3 dokmn	79.800.000	100	54.548.000	100	54.548.000	100	54.548.000	100	54.548.000	100	54.548.000	

RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG

Kewenangan Kabupaten/Kota																
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpul an pengolahan dan analisis industry, data kawasan industry serta data lain lingkup Kabupaten/ Kota system informasi Industri Nasional (SIINas)	100	100	100	79.800.00	100	54.548.0 00	100	54.548.0 00	100	54.548.0 00	100	54.548.0 00	100	54.548.0 00	
Deseminasi publikasi data informasi dan analisa industri kab./kota melalui SINas					0											

Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS					0											
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang ditempatkan	30%	8,57 %	11,43	20.000.000	14,3	12.378.000	20	12.378.000	22,87	12.378.000	28,57	12.378.000	28,57	12.378.000	
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah transmigran yang ditempatkan	1 KK	10 KK	10 KK	20.000.000	10 KK	12.378.000	10 KK	12.378.000	10 KK	12.378.000	10 KK	12.378.000	10 KK	12.378.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2 laporan	2 laporan	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	5.000.000	

RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG

Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	1 KK	10 KK	3 Kepala Keluarga	10.000.000	3 Kepala Keluarga	5.000.000	3 Kepala Keluarga	5.000.000	3 Kepala Keluarga	5.000.000	3 Kepala Keluarga	5.000.000	3 Kepala Keluarga	5.000.000	
Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	-		-	-	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	
Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	-		-	-	-	1.378.000	-	1.378.000	-	1.378.000	-	1.378.000	-	1.378.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Prosentase Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -	100 %		100 %	5.762.883.000	100%	6.549.178.740	100%	6.549.178.740	100%	6.549.178.740	100%	6.549.178.740	100 %	6.549.178.740	
	Prosentase layanan Umum dan Kepegawaian yang terpenuhi			100 %		100%		100%		100%		100%		100 %		

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan Kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100 %	100%	100 %	32.486.300.000	100%	108.000.000	100%	108.000.000	100%	108.000.000	100%	108.000.000	100 %	108.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Doku men	6 Doku men	6 Doku men	9.930.500	6 Doku men	75.000.000	6 Doku men	75.000.000	6 Doku men	75.000.000	6 Doku men	75.000.000	6 Dok ume n	75.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1.999.250	1 Doku men	2.500.000	1 Doku men	2.500.000	1 Doku men	2.500.000	1 Doku men	2.500.000	1 Dok ume n	2.500.000	

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Doku men	2 Doku men	2 Doku men	3.999.500	2 Doku men	5.000.00 0	2 Doku men	5.000.00 0	2 Doku men	5.000.00 0	2 Doku men	5.000.00 0	2 Dok ume n	5.000.00 0	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1.999.500	1 Doku men	2.500.00 0	1 Doku men	2.500.00 0	1 Doku men	2.500.00 0	1 Doku men	2.500.00 0	1 Dok ume n	2.500.00 0	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Doku men	2 Doku men	2 Doku men	2.942.500	2 Doku men	5.000.00 0	2 Doku men	5.000.00 0	2 Doku men	5.000.00 0	2 Doku men	5.000.00 0	2 Dok ume n	5.000.00 0	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Lapo ran	12 Lapo ran	12 Lapo ran	3.999.800	12 Lapo ran	5.000.00 0	12 Lapo ran	5.000.00 0	12 Lapo ran	5.000.00 0	12 Lapo ran	5.000.00 0	12 Lapo ran	5.000.00 0	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lapo ran	4 Lapo ran	4 Lapo ran	7.615.250	4 Lapo ran	8.000.00 0	4 Lapo ran	8.000.00 0	4 Lapo ran	8.000.00 0	4 Lapo ran	8.000.00 0	4 Lapo ran	8.000.00 0	
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 lapo ran	0	1 lapo ran	5.000.00 0	1 lapo ran	5.000.00 0	1 lapo ran	5.000.00 0	1 lapo ran	5.000.00 0	1 lapo ran	5.000.00 0	

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase tersusunnya dokumen administrasi keuangan Perangkat daerah yang tepat waktu	100 %	100 %	100 %	4.887.464.500	100%	5.019.679.740	100%	5.019.679.740	100%	5.019.679.740	100%	5.019.679.740	100 %	5.019.679.740	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang	37 orang/bulan	37 orang/bulan	4..875.483.000	37 orang/bulan	5.002.179.740	37 orang/bulan	5.002.179.740	37 orang/bulan	5.002.179.740	37 orang/bulan	5.002.179.740	37 orang/bulan	5.002.179.740	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 laporan	1 Laporan	1.981.500	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	2.500.000	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Lapo ran	12 Lapo ran	12 Lapo ran	10.000.00 0	12 Lapo ran	15.000.0 00	12 Lapo ran	15.000.0 00	12 Lapo ran	15.000.0 00	12 Lapo ran	15.000.0 00	12 Lapo ran	15.000.0 00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	100 %		100 %	100.000-	100	80.000.0 00	100	80.000.0 00	100	80.000.0 00	100	80.000.0 00	100	80.000.0 00	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan			10 Oran g	100.000	50 Oran g	80.000.0 00	50 Oran g	80.000.0 00	50 Oran g	80.000.0 00	50 Oran g	80.000.0 00	50 Ora ng	80.000.0 00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Perundang-Undangan															
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %			128.300.000	100%	367.000.000	100%	367.000.000	100%	367.000.000	100%	367.000.000	100 %	367.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	5 paket	8 Paket	6.000.000	8 Paket	12.000.000	8 Paket	12.000.000	8 Paket	12.000.000	8 Paket	12.000.000	8 Paket	12.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5 paket	0 -	-	20.000.000 -	-	20.000.000 -	-	20.000.000 -	-	20.000.000 -	-	20.000.000 -	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	35 paket	10 paket	10 Paket	6.000.000	10 Paket	7.500.000	10 Paket	7.500.000	10 Paket	7.500.000	10 Paket	7.500.000	10 Paket	7.500.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 paket	10 paket	10 Paket	50.000.000	10 Paket	75.000.000	10 Paket	75.000.000	10 Paket	75.000.000	10 Paket	75.000.000	10 Paket	75.000.000	

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	3 paket	5 Paket	10.000.000	5 Paket	15.000.000	5 Paket	15.000.000	5 Paket	15.000.000	5 Paket	15.000.000	5 Paket	15.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokmn		1 Dokumen	6.300.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	7.500.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu			1 laporan	0		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 laporan	70 laporan	70 Laporan	50.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Perkantoran	100 %	100 %	100 %	46.600.000	100%	135.000.000	100%	135.000.000	100%	135.000.000	100%	135.000.000	100 %	135.000.000	

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan			2 unit	0		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	63 unit	25 Unit	21.600.000	25 Unit	40.000.000	25 Unit	40.000.000	25 Unit	40.000.000	25 Unit	40.000.000	25 Unit	40.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26 unit	14 unit	1 Unit	25.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	0 -	1 Unit	90.000.000 -	1 Unit	30.000.000 -	1 Unit	30.000.000 -	1 Unit	30.000.000 -	1 Unit	30.000.000 -	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	0	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang operasional kantor	100 %	100%	100 %	529.980.600	100%	548.147.000	100%	548.147.000	100%	548.147.000	100%	548.147.000	100 %	548.147.000	

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	0	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0 -	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 Laporan	198.147.000	12 Laporan	198.147.000	12 Laporan	198.147.000	12 Laporan	198.147.000	12 Laporan	198.147.000	12 Laporan	198.147.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 Laporan	331.833.600	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	350.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jumlah barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	137.951.600	100%	231.352.000	100%	231.352.000	100%	231.352.000	100%	231.352.000	100%	231.352.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	31 unit	39	39 Unit	75.000.000	39 Unit	90.000.000	39 Unit	90.000.000	39 Unit	90.000.000	39 Unit	90.000.000	39 Unit	90.000.000	

Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-			-	5 unit	1.000.000	5 unit -	1.000.000	5 unit -	1.000.000	-5 unit	1.000.000	-5 unit	1.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	50 unit	50 Unit	22.949.760	50 Unit	30.352.000	50 Unit	30.352.000	50 Unit	30.352.000	50 Unit	30.352.000	50 Unit	30.352.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	1 Unit	40.001.840	1 Unit	90.000.000	1 Unit	90.000.000	1 Unit	90.000.000	1 Unit	90.000.000	1 Unit	90.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		1 unit-	-	1 Unit -	20.000.000 -	-1 Unit	20.000.000 -	-1 Unit	20.000.000 -	-1 Unit	20.000.000 -	-1 Unit	20.000.000 -	

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Santunan kematian usia 55-65 tahun sejumlah 11914 x 16800 x 8 bulan	Terjaminnya keselamatan pekerja	Kegiatan :Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
2.	Meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan pendataan pekerja rentan (Pekerja Non Formal seperti Petani dan Nelayan) → 6.000 Petani tembakau	Meningkatnya couverage pekerja rentan		
3.	Pelaksanaan May Day	Terciptanya hubungan Industrial yang harmonis	Kegiatan :Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
4.	Mengumpulkan stakeholder ketenagakerjaan: Bursa Kerja Khusus, LPKS (Lembaga Pelatihan Kerja Swasta), Perusahaan, Balai Latihan Kerja, P3MI (Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia) → Rakor dengan Bursa Kerja Khusus, LPKS (Lembaga Pelatihan Kerja Swasta), Perusahaan, Balai Latihan Kerja, P3MI (Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia)			
5	Pelaksanaan Job Fair	Mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran	Kegiatan :Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Sub Kegiatan :Job Fair/Bursa Kerja	
6.	Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	Meningkatnya wawasan Siswa SMK/SMU kelas 12 dalam menghadapi Dunia Usaha dan Dunia Industri	Kegiatan : Pelayanan Anatar Kerja Sub Kegiatan :Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	
6	Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi		Kegiatan :Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	

7	Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan		Kegiatan :Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :	
8	Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur	Pemberdayaan Masyarakat penganggur dan setengah penganggur dalam aktifitas pekerjaan	Kegiatan; Pelayanan Antar Kerja Sub Kegiatan: Perluasan Kesempatan Kerja	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Tenaga Kerja

Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja standar yang ditetapkan. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan ditetapkan guna menajmin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Sejalan dengan penilaian akuntabilitas kinerja intansi pemerintah, maka indikator kinerja digunakan sebagai instrumen dalam pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sejalan dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama PD

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	TPT	%	6,19-6,13	6,13-6,07	6,07-6,01	6,01-5,95	5,95-5,89	5,89-5,83	IUP
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		58,19	58.44	59.69	60.94	62.19	62.59	IUP
3.	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kabupaten/ kota		56,03	56,69	57.32	57,95	58.58	59.64	IUP
4.	TPAK	%	72,6	72,96	73,32	73,68	74,05	74,41	IKU
5.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	27,39	27,65	27,92	28,19	28,46	28,73	IKU
6.	Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah	%	6,48	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	IKU

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	1,18	2,03	2,78	3,45	4.05	4,6	
3.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota	%	72,43	73,13	73,83	74,54	75,26	75,98	
4.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigran	%	8,57	11,43	14,3	20	22,87	28,57	
6.	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	%	6,5	6,5	6,5	6,6	6,6	6,6	
7.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	10	10	10	10	10	10	
8.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Indeks	125	125	125	125	125	125	

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 merupakan rencana pembangunan selama 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Pemalang. Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif. Renstra dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang untuk kurun waktu lima tahun. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang, adalah sebagai berikut :

- 2.2.2.1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah.
- 2.2.2.2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang serta para pihak terkait dalam pembangunan di bidanag ketenagakerjaan.
- 2.2.2.3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang.
- 2.2.2.4. Sebagai acuan dalam penyusunan dok ren opd tahunan

2. Kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat, bidang, dan jabatan fungsional pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang agar mendukung pencapaian target-target Renstra Tahun 2025-2029 dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang dengan sebaik-baiknya;
- b. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 kemudian digunakan juga sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pemalang Tahun 2026-2030.
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

d. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang memungkinkan untuk diubah berdasarkan ketentuan, sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil pengendalian, monitoring, dan evaluasi apabila proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah.
- 2) Hasil pengendalian, monitoring, dan evaluasi menunjukkan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Terjadi perubahan mendasar (bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial politik, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau terjadi perubahan kebijakan ditingkat nasional

3. Pedoman Transisi

Sebagai pedoman pada masa transisi, yaitu pada saat Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2030–2034 belum tersusun, maka untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta mengisi kekosongan Rencana Kerja setelah Renstra berakhir, maka Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renja dan RAPBD Tahun 2030.

Tim Penyusun

LAMPIRAN

CASCADING DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG

